



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RDP KOMISI IX DPR RI DENGAN KEPALA BADAN PPSDM DAN KEPALA  
BALITBANGKES KEMENTERIAN KESEHATAN**

Tahun Sidang	:	2014-2015
Masa	:	II
Persidangan	:	
Rapat ke-	:	
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Hari, Tanggal	:	Selasa, 10 Februari 2015
Waktu	:	14.00 WIB –16.30 WIB
Tempat	:	Hotel Aryaduta Tugu Tani, Ball Room B Lobby Level, Jakarta Pusat
Ketua Rapat	:	Dra. Hj. Ermalena MHS/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI;
Sekretaris Rapat	:	Muhammad Yus Iqbal, SE/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Acara	:	Pendalaman Rincian Program dan Kegiatan RAPBN-P Tahun 2015 para Eselon I Kementerian Kesehatan RI
Hadir	:	43 Anggota

**PIMPINAN KOMISI IX DPR RI :**

1. Dede Yusuf Macan effendi, S.T, M.I.Pol (F-PD)
2. H. Syamsul Bachri, M.Sc (F-PG)
3. Pius Lustrilanang, S.IP, M.Si (F-P.Gerindra)
4. H. Asman Abnur, SE.,M.Si (F-PAN)
5. Dra. Ermalena, MHS (F.PPP)

**F.PDIP :**

6. Alex Indra Lukman
7. Hj. Elva Hartati, S.IP, MM
8. Ir, Ketut Sustiwana
9. dr. Ribka Tjiptaning

10. Daniel Lumban Tobing
11. H. Imam Suroso, S.Sos, SH, MM
12. Nursuhud
13. Abidin Fikri, SH

**F.PG :**

14. Hj. Saniatul Lativa, SE
15. Hj. Dewi Asmara, SH, MH.
16. H. Budi Supriyanto, SH, MH
17. dr. Charles J. Mesang
18. Aditya Anugrah Moha, S.Ked
19. drg. Hj. Andi Fauziah Pujawatie Hatta, SKG

**F.P.GERINDRA :**

20. Khaidir
21. dr. H. Suir Syam, M.Kes
22. Susi Syahdonna Bachsin, SE, MM.
23. drg. Putih Sari
24. Roberth Rouw.

**F.PD :**

25. Drs. H. Zulfikar Achmad
26. Siti Mufattahah, Psi.
27. Drs. Ayub Khan.
28. dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang
29. Hj. Aliyah Mustika Ilham, SE.

**F.PAN :**

30. Ir. H.A. Riski Sadig
31. Dr. H.M. Ali Taher Parasong, SH, M.Hum
32. Hang Ali Saputra Syah Pahan, SH

**F.PKB :**

33. H. Handayani, SKM
34. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA
35. Dra. Hj. Siti Masrifah, MA

**F.PKS :**

36. Ansory Siregar, Lc
37. Drs, H. Chairul Anwar, Apt

**F.PPP :**

38. Dra. Hj. Okky Asokawati, M.Si.
39. Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz, M.Si.

**F.P.NASDEM :**

40. Irma Suryani Chaniago, SE
41. Ir. Ali Mahir, MM
42. Amelia Anggraini

**F.P. HANURA :**

43. Capt. Djoni Rolindrawan, SE.,M.MAR, MBA

**UNDANGAN :**

1. Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp(K), DTM & H,DTCE (Kepala Badan Litbangkes Kemkes) beserta jajaran.
2. drg. Usman Sumantri, M.Sc ( Kepala Badan PPSDM Kemkes) beserta jajaran.

**JALANNYA RAPAT :**

**KETUA RAPAT (F-PPP/Dra. ERMALENA, MHS) :**

**Yang terhormat Anggota DPR RI Komisi IX,  
Yang saya hormati Badan Litbang dan Badan PPSDM beserta seluruh  
jajaran.**

Tadi pagi kita baru menyelesaikan dua Dirjen, tadi malam satu dan hari ini kita akan selesaikan dua, masih ada lagi yang akan kita selesaikan pada sore ini karena tadi acara diskors, mari kita buka skors ini dengan mengucapkan *bissmillahirrahmanirrahim*.

**(SKORS DICABUT PUKUL 14.15 WIB)**

Sekarang kita akan melaksanakan Rapat sampai jam 4 sore ya, jadi saya mohon kepada Bapak berdua untuk menyampaikan presentasi secara singkat, kemudian nanti Teman-teman Anggota Komisi IX DPR RI bisa melakukan pendalaman juga khusus dalam bidang anggaran. Untuk itu saya persilakan kepada Badan PPSDM duluan silakan.

**KEPALA BADAN PPSDM (drg. USMAN SUMANTRI, M.Sc) :**

Ijin Prof.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*  
Selamat siang dan salam sejahtera.

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi IX DPR RI dan seluruh Anggota  
yang hadir dalam pertemuan ini.  
Teman-teman dari Kementerian Kesehatan, dari Litbang maupun dari  
PPSDM.**

Terima kasih atas waktunya Ibu Pimpinan, saya akan singkat barangkali cepat karena waktu. Rencana kerja PPSDM Tahun 2015....

**F-PAN (Dr. H.M ALI TAHER PARASONG, SH., M.Hum) :**

Pimpinan, biasakan jabatannya apa, namanya siapa supaya nanti kalau ketemu di jalan pakai *assalamu'alaikum*. Nama, stafnya siapa.

**KETUA RAPAT :**

Siap, silakan Pak lanjut.

**KEPALA BADAN PPSDM:**

Baik, terima kasih Pak.

Saya sebenarnya mau memperkenalkan tetapi lupa. Saya perkenalkan barangkali di PPSDM, saya Usman Sumantri, di sebelah kanan saya ini Dr. Asikin Iman Dahlan Ses Badan PPSDM, sebelah kanannya Pak Iman ini Dr. Ahmad Subagyo Kapus Perencanaan dan Penggunaan Daya Guna Tenaga Kesehatan, jadi Pak Ahmad Subagyo ini yang mengerjakan soal intensif dan timlis Bapak, Ibu sekalian. Sebelah kanannya Ibu Menarwati, Beliau ini di pusat standarisasi dan sertifikasi pendidikan berkelanjutan, jadi ditangan Bu Menarwati ini tentang tugas belajar dan program dokter gigi spesialis, jadi kalau mengenai pembiayaan belajar-belajar tentang spesialis ada di Bu Menarwati. Mohon maaf satu lagi Dokter Kirana yang membawahi pendidikan, jadi terkait dengan politeknik kesehatan dan berbagai keterkaitan dengan pendidikan, disitu kurikulum dan sebagainya. Satu lagi Pak Sarjono Beliau ijin karena ada yang sangat penting di Cikarang, Beliau Kapus Diklat Aparatur, jadi disana melatih tentang pelatihan-pelatihan SDM kita. Jadi, ada 5 kepala pusat Pak keseluruhan, 4 Kepala Pusat 1 Sesbadan dengan 2 wanita dan 3 laki-laki jadi hampirimbang.

Saya lanjut Bu, organisasi dan tugas fungsinya slide langsung. Ini tadi saya disini satu garis badannya Pak Iman, ini disini Bu Menarwati, sertifikasi MTKI dan sebagainya ada disini, lalu ada pusat pendidikan pelatihan yang tadi saya sampaikan diklat PIN3, PIN4 ada disini termasuk pelatihan-pelatihan lainnya, lalu ada pusdiklat tenaga kesehatan, ini terkait dengan pendidikan. Kita punya 38, saya bicara ini dulu Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, jadi semua kebutuhan tenaga kesehatan ada disini, berapa kebutuhannya, jenisnya dan sebagainya ada di pusat ini. Lalu kita punya UPT 38 Politeknik Kesehatan di seluruh Indonesia, di seluruh Provinsi ada, lalu 3 balai besar pelatihan kesehatan dan 3 Babelkes, jadi keseluruhan ini ada di UPT kita UPTnya Badan PPSDM.

Ini saya pikir garis besarnya untuk Badan PPSDM mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, ini fungsinya menyusun kebijakan teknis, pelaksanaan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksana administrasi PPSM dan seterusnya. Program *outcome* dan rencana kerja Tahun 2015, kita dapat anggaran Rp.3.568.570.000,- (*Tiga Triliun Lima Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*). Outcomenya meningkatkan ketersediaan dan mutu sumber daya kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Anggaran PPSDM nah ini garis besar secara kita bagi tiga Bapak dan Ibu sekalian, di PPSDM itu punya anggaran terkait dengan pendidikan, ini justru yang besar Rp.1,45 triliun ini anggaran pendidikan 720 nya di kantor pusat, 730 nya di Polteges 38 tetapi sebagian kebutuhan polteges ini sudah di anggaran ini juga yang di pusat, lalu yang betul-betul anggaran pelayanan kesehatan kami punya Rp.235 miliar yang betul-betul bersentuhan dengan kesehatan, itu pun masih soal administrasi di kantor pusat ya untuk operasional, lalu yang fungsi pelayanan umum yang sifatnya mengikat gaji pegawai dan sebagainya dari sini, ini lebih detailnya di slide berikut.

Nah, ini yang 1,3 pelayanan umum ini saja jadi untuk gaji, operasional perkantoran lalu TU Poksi Sekretariat Badan, ini anggaran pendidikan rupiah murninya 909, PNBPNya 540 ini rincian peruntukkannya dibawah.

Nah, yang Rp.235 miliar yang fungsi kesehatan rupiah murninya 226,97 dan PNBP 8,14 ini operasional perkantoran 4 Satker yang tadi BPK dan Bapekes 62,4 miliar, lalu untuk TU Poksi satker kantor pusat 6 satker Bapekes ini 173, ini yang agak besar tahun ini diperlukan Bapak dan Ibu sekalian karena memang Tahun 2015 ini ada kebijakan untuk tidak menggunakan hotel jadi banyak nanti dia larinya ke fungsi-fungsi diklat, karena ruang-ruang diklat kita cukup banyak Pak, jadi harus dipakai perlu sementara PNBPnya masih rendah kita sedang melakukan perubahan untuk tarif dan sebagainya.

Lanjut, arah kebijakan dan indikatornya, jadi mungkin ini saya garis besarnya saja strategi kita pertama pemenuhan tenaga kesehatan terutama yang utama bukan berarti yang lain tidak ya, kita fokus ke daerah terpencil dan perbatasan melalui penempatan tenaga kesehatan yang baru lulus *affirmative policy*, jadi ini yang kita fokuskan karena memang kalau kita semua mau masukkan dananya tidak tercukupi ya. Yang kedua, peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi, pendidikan pelatihan serta sertifikasi seluruh jenis tenaga kesehatan, nanti detailnya ada dibawah di slide berikut. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan termasuk pengembangan dokter spesialis, ini yang tadi kami sampaikan yang program-program Tubel dan PPDGS ya di nomer 3. Pengembangan insentif financial dan non financial bagi tenaga kesehatan serta pengembangan sistem pendataan tenaga kesehatan dan upaya pengendalian pengawasan tenaga kesehatan.

Bapak, Ibu ini indikator program, PPSDM punya tiga indikator utama, satu, jumlah puskesmas minimal mempunyai 5 jenis tenaga yang kita masukkan ke puskesmas, maksudnya begini di puskesmas itu sudah ada Dokter, Bidan, Perawat, kita tambahkan lagi dengan Tenaga-tenaga kesehatan lain seperti kasling, promkes, analis, farmasi dan gizi. Jadi, tenaga-tenaga ini kita tambahkan Pak karena kita produksi juga tenaga-tenaga (tidak jelas) tanding kesehatan yang kita bisa serap lalu kita tempatkan di Puskesmas-puskesmas ini supaya nyambung. Ini kaitannya sama juga dengan kebutuhan yang di *setting* di perencanaannya BUK, mereka merencanakan 5600 puskesmas terakreditasi, karena itu kami jembatani Pak, ini sebagai supporting untuk puskesmas, kalau dia tidak terpenuhi tenaganya maka dia tidak terakreditasi, karena itu angkanya sama Bapak, Ibu yang BUK itu 5600 puskesmas terakreditasi karena target kita juga 5600 terpenuhi tenaga kesehatannya, ini memang kita supporting ya. Lalu presentase rumah sakit yang mempunyai 4 (empat) spesialis dasar dan 3 (tiga) spesialis penunjang ini juga disesuaikan dengan target-target di BUK, ini 60% kita targetkan Tahun 2019 7 spesialis rumah kelas C terpenuhi dan tahun ini kami menerbitkan 2007 spesialis, jadi tahun ini yang lulus PPDS ada 27 orang estimasi kita, jadi nanti sampai Tahun 2019 minimal 60% kita bisa penuhi dengna 7 spesialis, karena keluhan utama sekarang memang disini kekurangan spesialis terutama anastesi, patalogi klinik, radiologi klinik kita penuhi disini. Lalu jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya secara kumulatif ini melalui pelatihan-pelatihan, kira-kira 56910 pelatihan yang kita lakukan terhadap tenaga kesehatan, ini SDMnya.

Lalu, ini untuk kegiatan eselon 2 dengan indikator kegiatan, kegiatan eselon 2 ini standarisasi sertifikasi yang Bu Mey, indikator kinerja kegiatan,

indikatornya adalah jumlah tenaga kesehatan yang teregistrasi, ini di Bu Mey. Lalu pendidikan tinggi dan peningkatan mutu SDM kesehatan indikatornya adalah jumlah peserta baru penerima bantuan pendidikan, jadi yang ini kita targetkan untuk spesialis tahun ini saja yang kita biayai 1000 orang itu pun kalau dia lulus nanti di tes perguruan tinggi Pak, karena yang menentukan lulus tidaknya perguruan tinggi. Jadi, kalau dia mau ambil misalnya spesialis anastesi maka dia daftar dulu di fakultas tesnya lulus baru kita biayai, kalau dia tidak lulus tidak mungkin dia kita biayai. Jadi, 1000 orang itu kita targetkan adalah mereka yang lulus mengikuti tes ambil spesialis seperti itu. Lalu yang ketiga, pendidikan dan pelatihan aparatur ini jumlah aparatur yang mendapat sertifikat pelatihan terakreditasi, lalu pendidikan pelatihan sama jumlah pendidik ini Dosen-dosen yang kita sertifikasi.

Lalu yang kelima, pengelolaan mutu pendidikan. Indikatornya adalah presentase program studi atau institusi proteges kementerian yang terakreditasi baik, jadi kita targetkan dengan Badan Akreditasi Nasional ini kita targetkan berapa yang B akan menjadi A, yang C menjadi B dan seterusnya nanti akreditasinya. Lanjut, presentase pendayagunaan SDM Kesehatan ini indikatornya adalah jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan, ini nyambung dengan tadi yang target-target kita, saya ijin barangkali yang nomer 7 ini yang intensif yang sering kita diskusikan adalah pelaksanaan prinsip kesehatan indikatornya jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan intensif, tahun ini ada 5600 target kita tetapi ternyata kurang kita hitung-hitung karena Tahun 2014 ada satu angkatan Pak, jadi kita mungkin nanti perlu sekitar 8000 dokter intensif, sekarang baru 6500 di alokasi anggaran kita.

Yang ke delapan, dukungan manajemen pelaksanaan tugas lainnya pada program PPSDM. Yang ke sembilan, pembinaan dan pengelolaan pendidikan tinggi. Lanjut, ini yang di pusat standarisasi, sertifikasi pendidikan berkelanjutan SDM, jumlah standarisasi sertifikasi jumlah uangnya ada Rp.23 miliar, pengembangan profesi kesehatan berkelanjutan dalam rangka penjaminan mutu ini ada 4 dokumen kita hasilkan, nah ini yang tadi saya sampaikan tenaga kesehatan yang memiliki surat tanah registrasi, tahun ini kita targetkan 100.000 orang registrasi ya Bu, 100.000 orang terakreditasi tenaga kesehatan yang dapat STN, lalu penyusunan tahun ini ternyata tahun 2014 ini tercapai 100.000 melebihi.

Kemudian, penyusunan, perencanaan NSPK lalu pelaksanaan (tidak jelas), penganugerahan tenaga kesehatan teladan ini ada di kita baru, sebelumnya ini dibawah Sekjen, jadi setiap tahun kami menerbitkan dan memilih Dokter-dokter tenaga kesehatan teladan seluruh Provinsi nanti dikirim ke pusat. Lalu yang kedua, pendidikan tinggi dan peningkatan mutu SDM kesehatan Rp.446 miliar yang tadi saya jelaskan tahun ini 1000 orang yang kita targetkan ambil spesialis dan seterusnya.

Lanjut, ini pusat pendidikan dan pelatihan pusdiklat aparatur melatih 9000 orang ya, ini semuanya dilakukan di Balai-balai kita yang tadi 7 (tujuh), 6 balai kesehatan kita punya mereka dilatih disini Pak, jadi termasuk kita melatih ada pengembangan diklat Tim, jadi kalau Pejabat-pejabat yang ke-4, ke-3 kita siapkan disini di pusdiklat kita. Ini yang pusdiklat kesehatan yang membawahi pendidikan kesehatan, tahun ini kita pendidikan pelatihan dan kesehatan ada Rp.20 miliar ini sebagian besar

kita gunakan untuk melatih tenaga dosen di Poltekes ada 1200 orang yang kita latih, kemudian kurikulum modul tenaga kesehatan masyarakat ini ada satu proses yang kita sesuaikan tingkatan paskesmasnya Pak, karena sekarang UKP-UKP kita dorong tenaga kesehatan kita lebih ke public head Pak, yang ke masyarakat dan struktur.

Lalu dokumen peningkatan kualitas perhatian tenaga kesehatan dan tenaga pendidik, ini ada 6 dokumen yang kita perlukan. Lalu tentang mutu pendidikan tinggi Rp.24 miliar, ini bahan kurikulum pendidikan tenaga kesehatan dikembangkan mengacu pada standar nasional apalagi kita menghadapi masyarakat ekonomi Eropa kurikulum ini nanti ditingkatkan supaya sejajar. Pembinaan tenaga pendidik untuk memperoleh sertifikat dosen 300, dosen baru kita sertifikasi ini sebagai suatu persyaratan sebagai dosen. Jadi, seluruh dosen sekarang harus di sertifikasi. Kemudian, dokumen peningkatan kualitas pendidikan tenaga kesehatan, lalu dokumen pengendalian mutu pendidikan tenaga kesehatan.

Ini yang menyerap dana besar adalah intensif Bapak dan Ibu sekalian, pelaksanaan intensif tenaga kesehatan tahun ini kita siapkan Rp.250 miliar untuk 6500 dokter baru yang selesai baru lulus kita berangkatkan ke Daerah-daerah, 6500 ini tadi saya sampaikan kita targetkan mungkin tahun ini kita tambah Pak, tidak 6500 mungkin sampai 8000an nanti kita lihat, sementara anggaran tersedia memang untuk 6500 dokter kita hitung.

Perencanaan pendayagunaan SDM kesehatan untuk penugasan khusus tenaga kesehatan yang berbasis tim, jadi Bapak, Ibu sekalian tahun ini ada yang baru untuk PPSDM adalah pengembangan penempatan tenaga kesehatan berdasarkan tim, Bapak, Ibu barangkali sudah dengar kemarin ada tim yang kita kirim tidak satu per satu tetapi ada beberapa orang langsung sesuai keperluan puskesmas tetapi kami targetkan dahulu pada daerah perbatasan Pak, karena persoalannya sangat luar biasa perbatasan, jadi dokternya, perawatnya, bidannya semua kaselingnya, farmasinya harus dipenuhi Pak, terutama untuk yang perbatasan dulu. Ada di 48 kabupaten dengan 120 puskesmas ini yang di daerah perbatasan, Tahun 2016 sementara kita sama nusantara set tetapi kemarin kita ada masuk organisasi atau apa kita nanti ngomong ke Bu Menteri kalau mau diganti ya, kebetulan kita belum *publish* juga Pak.

Kemudian, perencanaan SDM kesehatan ada 2 dokumen, pendayagunaan SDM kesehatan luar negeri 300 orang jadi banyak sekali mahasiswa kita yang belajar juga ke luar negeri tetapi tetap ada persyaratan perguruan tingginya harus diakui oleh Indonesia dan seterusnya dan lulus tesnya. Pendayagunaan tenaga kerja warga negara asing di Indonesia ini juga kita lakukan Pak, kita sidak dengan profesi-profesi lain dan kita atur terutama banyak sekali tenaga kerja asing yang bekerja di kita tidak punya ijin, jadi ini sudah terjadi dan sudah beberapa kali kita lakukan ada beberapa rekomendasi yang kita pulangkan ke negaranya, jadi ini memang sudah terutama di Kota-kota besar Bapak dan Ibu sekalian, ini program kita jadi harus kita optimalkan beberapa tahun ini penting sekali.

Ini untuk yang sekretariat badan, kegiatan-kegiatan kesekretariatan ini penyusunan unit PK, penyusunan rencana program dan anggaran, penyusunan pelaporan, penyusun laporan kinerja, pembayaran gaji dan



seterusnya 12 bulan, lalu pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi ini memang *main materialnya* ada di SES, kalau kurikulumnya ada di pusat diklat Nakes ya, ada pembedanya, kalau *main materialnya* ada disini termasuk terkait dengan riset bagi dana pendidik dan seterusnya, beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, tugas belajar mahasiswa yang miskin, ini kita tampung semua, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dan seterusnya.

Ini yang usulan tambahan sebenarnya tetapi saya serahkan nanti sepenuhnya kepada Bapak dan Ibu sekalian, Pimpinan, ini yang kita usulkan ada anggaran-anggaran yang memang belum terpenuhi semua terutama kami fokus kemana Pak Iman yang paling, manajemen SDM Profesi ya? Jadi, ada tenaga kesehatan kita undang-undang tenaga kesehatan yang diterbitkan pada periode yang lalu kita menerbitkan Undang-Undang Tenaga Kesehatan ternyata dilapangan itu ada 146 ribu tenaga kesehatan yang pendidikannya dibawah D3, sedangkan undang-undang kita mengatakan minimal ini jamannya Ibu Tjiptaning dulu buat undang-undang ini, karena Beliau langsung memimpin Pak, tenaga kesehatan minimal D3 ternyata di lapangan banyak sekali belum D3 Pak, nah sementara dikasih waktu 6 tahun yang belum D3 ini harus menyesuaikan dengan undang-undang, tetapi bagaimana mencetaknya memang perlu anggaran yang cukup besar di dalam pengembangan program pendidikan jarak jauh dengan tutorial dia tidak perlu meninggalkan tempat kerjanya, jadi kalau dia di puskesmas terpencil dia tetap bisa ikuti kurikulum ini, kita kasih kurikulum tutorialnya kasih bahan, nanti ada yang mendidik melalui Poltekes begitu, mudah-mudahan nanti mereka bisa menyesuaikan dengan undang-undang, bisa menjadi minimal D3, itu yang kita rencanakan untuk (tidak dilanjutkan)..sebenarnya ada yang sudah jalan di NTT di dua kabupaten tetapi masih sedikit peserta baru 87 orang, satu lagi Kaltim di Nunukan itu yang sudah berjalan, kita akan perluas untuk daerah-daerah lain.

Lalu yang tadi saya sampaikan kekurangan biaya untuk program dokter intensif ya? Jadi kalau kita mau naikkan dia menjadi 8000 dokter intensif kita perlu tambahan anggaran sekitar Rp.30 milliar, lalu pemenuhan tenaga kesehatan di BPPK yang ini 192 miliar dan seterusnya. Ini usulan tambahan untuk Tahun 2015 lanjutan tadi memang kita usulkan sekitar Rp.1 triliun, dengan catatan memang ada nanti yang sangat-sangat prioritas adalah yang pembangunan gedung yang mangkrak Ibu dan Bapak sekalian di semua Provinsi ada 15, yang mangkrak itu ada 13 ini membutuhkan anggaran sekitar Rp.225 miliar ini pun sebelum keseluruhan, jadi anggaran ini kita targetkan untuk yang Tahun 2015 sama yang peralatan alat ajar mengajar ini laboratorium di Poltekes, jadi memang pendidikan yang baik harus disediakan sarana pendukung untuk belajar mengajar seperti laboratorium terpadu dan sebagainya, ini belum keseluruhan Poltekes mempunyai, jadi kalau Bapak dan Ibu Pimpinan sekali-kali bisa lihat kita punya Babelkes juga di Batam itu punya alat yang cukup canggih untuk pelatihan, banyak Rumah-rumah Sakit, anak-anak koas juga yang belajarnya di Batam.

Barangkali itu, mohon maaf kalau ada yang kurang kami siap untuk melakukan diskusi.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Usman Sumantri.  
Dan selanjutnya kepada Prof.Chandrayoga silakan.

**KEPALA BADAN LITBANGKES (Prof. dr. TJANDRA YOGA ADITAMA, Sp(K), DTM & H,DTCE) :**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI.**

Saya akan sampaikan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, langsung saja ke slide 3 sekaligus perkenalan sesuai dengan arahan tadi. Jadi, ini adalah struktur Organisasinya, saya Chandrayogaditama Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, kemudian sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan adalah sebelah kiri saya Ibu Ria Sukarno, kemudian Kepala Pusat Geomedis adalah Ibu Pretimulti yang dibelakang berdiri, kemudian Kepala Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik, penamaan ini adalah penamaan sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan, ini yang melakukan penelitian dasar di laboratorium, penelitian di klinik dan rumah sakit adalah Dokter Siswanto yang berbaju merah, nah ini melakukan penelitian di masyarakat, jadi Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat Pak Anwar Musadad. Sementara ini menilai hal-hal yang katakanlah diluar kesehatan tetapi berpengaruh kepada kesehatan misalnya pemberdayaan masyarakat, kebijakan kesehatan, kebudayaan begitu apa dampaknya pada kesehatan dan ini Kepalanya Pak Agus Suprpto di belakang duduknya. Kemudian, ada dua balai besar, balai besar tanaman obat dan obat tradisional yang meneliti tentang tanaman obat dan jamu ini berkedudukan di Tawangmangu Ibu Indah, sementara ini balai penelitian pengembangan sektor dan (tidak jelas) penyakit, jadi yang menyebarkan dan menularkan penyakit Ibu Fifi. Jadi, perkenalan ini adalah UPT-UPT yang ada di daerah tempatnya seperti ini tetapi yang hadir eselon 2 adalah yang ini. Demikian Pak.

Slide berikutnya, sesuai dengan Permenkes maka tugas kami adalah melakukan penelitian dan pengembangan, fungsinya mulai kebijakan teknis, melakukan penelitiannya sendiri, evaluasi penelitian dan tentu saja administrasi daripada penelitian dan pengembangan kesehatan. Kalau bicara program, out come dan rencana kegiatan jadi anggaran kami untuk Tahun 2015 adalah Rp.744.883,- (*Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Milliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah*). Tahun 2014 itu anggarannya Rp.509 miliar dan sekarang Tahun 2015 Rp.744.833,- dengan outcome meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatannya. Saya laporkan Ibu dan Bapak sekalian secara rinci IKK dari masing-masing unit kegiatan itu, unit kegiatan yang pertama yang tadi saya sampaikan biomedis dan teknologi, jadi ini lebih ke laboratorium, anggaran untuk penelitiannya adalah Rp.135 miliar dan ada 10 penelitian yang harus dicapai antara lain bahan baku obat ini adalah obat malaria,

kandidat vaksin untuk tuberkulosis, bagaimana protein untuk demam berdarah tinggi, bagaimana untuk menangani yang tiftri yang sekarang kalau tidak salah ada kasus di Padang, bagaimana ini untuk *stand down* sel puncak yang bisa bikin orang kelihatan muda begitu ya, berotot dan sebagainya ini kita, kalau ada yang mau nanti kita..

Kemudian, metode untuk HIV ini untuk pemetaan beberapa penyakit menular malaria dan sebagainya dan juga penyakit tidak menular dan kami akan ada survey Tahun 2015 ini tentang apa saja paparan bahan kimia yang ada pada makanan yang kita makan sehari-hari, pusat ini harus menghasilkan 20 karya artikel penelitian, itu yang pertama tadi yang dilaboratorium. Yang kedua, ini yang di rumah sakit, jadi kalau tadi di laboratorium ini misalnya bagaimana membuat urutan-urutan diagnosis ini untuk Tuberkulosis ini di klinik dan rumah sakit bagaimana menilai garam beryodium ini anggaran penelitiannya 38, bagaimana untuk penanggulangan Gaky adalah gangguan akibat kekurangan yodium, ini antara lain bisa menimbulkan kretin dan sebagainya, kemudian bagaimana metode mendeteksi itu di dalam urin dan bagaimana juga penting hubungan antara status gizi pada saat lahir dengan tumbuh kembang anak itu pada usia 4-5 tahun, bagaimana penelitian alat-alat medis yang inflamasi di rumah sakit, juga ada hipertensi, kita tahu hipertensi merupakan penyakit yang cukup bermasalah sekarang, saya juga hipertensi kalau tidak makan obat. Saya tidak tahu apakah Bapak dan Ibu sudah mengecek tensi hari ini? Saya yakin Pak Usman dan saya tensinya naik karena mau presentasi, jadi saya sudah makan obat tadi malam.

Kemudian, bagaimana membaca rontgen kan kalau Bapak, Ibu ke rumah sakit ada foto rontgen dan seringkali pasien itu mengambil foto rontgen ada keterangan tertulisnya, pada keterangan tertulisnya tidak selalu sesuai dengan keadaannya karena itu harus ada semacam validasi penilaiannya. Ini garis besar yang saya sampaikan, ini yang di klinik dan rumah sakit. Yang ketiga, ini yang di kesehatan masyarakat anggarannya Rp.84 miliar penelitiannya antara lain gangguan kembang anak, kemudian kita sudah mencoba agar di semua daerah sistem pencatatan sipil ini (tidak jelas) itu menjadi bagian yang rutin sehingga untuk mendapatkan data itu mudah begitu, kemudian bagaimana kesehatan berbasis sekolah, bagaimana pelayanan kesehatan (tidak jelas) akan diteliti di Provinsi Maluku di Tahun 2015 ini dan juga uji kerentanan ini apakah insektisida yang disemprotkan untuk membasmi nyamuk itu masih efektif atau tidak efektif, kemudian ada penelitian karies gigi sehubungan dengan daerah tertentu, saya kira ada banyak 23 ini partisipasi Ibu pada pelayanan kesehatan, radion, Mpasi seperti apa, kemudian ini yang tadi disampaikan oleh Pak Usman kita akan teliti bagaimana sebenarnya ada beban kerja perawat, bidan, dokter dalam formulasikapitasi di Puskesmas terutama.

Slide berikutnya, sekarang sudah mulai ada posyandu lansia, bagaimana sebenarnya efektivitas posyandu lansia dimana mereka memeriksakan diri secara teratur terhadap kualitas hidup, apakah dengan posyandu ini kualitas hidupnya bisa lebih baik dan untuk Malaria ada *Long-lasting insecticidal nets* kelambu dengan insektisida kami teliti efektivitasnya untuk mencegah Malaria. Kemudian, ini juga penting nomor 17, tentang perubahan iklim, apalagi sekarang hujan Jakarta banjir sejak

kemarin, sekarang bersyukur tidak banjir lagi tetapi apa dampaknya terhadap kesehatan.

Ini misalnya bagaimana dampak kesehatan dan hubungan dengan pariwisata kita coba Malaria di Pangandaran karena kita punya balai penelitian di Pangandaran, tidak ada hubungan dengan Ibu Menteri dari Pangandaran.

Slide berikutnya, untuk mencegah Filaria dilakukan pengobatan massal kami nilai apakah pasca pembelian obat ini bagus atau tidak, pusat ini harus mempublikasi 33 artikel. Ini yang ke-4 yang saya bilang aspek budaya maka mereka akan menilai, ini budaya dan ekonomi misalnya tidak langsung pasien PBI di Jawa dan Madura, jadi ini aspek seakan-akan ekonomi kesehatan, kemudian mereka akan melihat juga tentang model kemitraan bidan dan dukun bayi bagaimana baiknya, bagaimana JKN dilaksanakan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan.

Kemudian, mereka mempunyai penelitian budaya, budaya kesehatan, ada beberapa tahun ini di Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Sumatera Selatan dengan anggaran Rp.69 miliar totalnya. Oh masih ada terus ya, NTT, Papua Barat, Aceh dan sebagainya.

Kemudian, saya masuk ke jamu, untuk jamu ini beberapa yang akan kami teliti Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, penelitian pengembangan tanaman obat, seledri, kunyit, temulawak, ini penting Bapak-bapak, purwoceng sesuai dengan namanya mungkin bisa dimengerti sendiri kira-kira gunanya untuk apa begitu. Kemudian, bahan jamu terstandar akan ada tiga yang akan kami teliti dan jamu-jamu scientific serta kami akan membuat database 700 materi tanaman obat pada Tahun 2015 ini dengan anggaran Rp.113 miliar. Ini untuk jamu.

Sementara berikutnya, untuk penyebaran penyakit, untuk sektor ini akan dilakukan riset khusus vektoran nanti akan saya jelaskan 16 riset yang dihasilkan kita akan teliti tentang Dengue yang sedang marak sekarang ini yang masih ada beberapa daerah di Indonesia, ini adalah semacam cara baru membasmi nyamuk tidak dengan penyemprotan.

Slide berikutnya, ini yang sekretariat badan perencanaan, dokumentasi, keuangan, BMN, kepegawaian dan sebagainya dengan anggaran Rp.195 miliar.

### **Ibu Pimpinan, Bapak dan Ibu yang saya hormati,**

Secara cepat saya sampaikan ini agenda riset kami sampai Tahun 2019, riset kesehatan dasar yang tadinya dilakukan 5 tahun sekali sekarang selain riset Tahun 2015 maka sekarang setiap tahun akan ada riset dasar kecil yang menilai indikator kinerja setiap tahun itu yang dulu pernah dilakukan pada Tahun 2013 di setiap Provinsi. Kemudian, Tahun 2015 juga akan bagian kedua studi diet total bentuknya analisis cemaran (tidak jelas) tadi sudah saya sampaikan, Tahun 2014 sudah selesai survey konsumsi makan yang dimakan kita tahu apa yang dimakan oleh orang Indonesia sehari-hari begitu, kami meneliti pada 51.000 rumah tangga di seluruh Indonesia 191.000 orang, terima kasih Pak. Kemudian, pada Tahun 2015 kami tidak melakukan riset ini, ini adalah pencemaran lingkungan tetapi Tahun 2016 sedang kita lakukan, yang sedang kami

lakukan adalah bagaimana cemaran pestisida, merkuri dan timbal atau (tidak jelas).

Slide berikutnya, riset budaya akan diteruskan yang sudah dilakukan Tahun 2012 sampai 2015 Madura, Gayo, Nias, Manggarai, Dayak, Gorontalo, Toraja, Mamasan, Maluku, (tidak jelas), Tahun 2015 ini ada 30 etnis lagi yang akan diteliti bagaimana aspek budayanya dan ada yang selesai tahun 2000 sekian ini akan dilihat intervensinya, karena budayanya begini bagaimana intervensi. Riset obat tumbuhan dan jamu kami sudah berhasil mengidentifikasi seperti ini Bapak dan Ibu sekalian, 19.000 tanaman obat, 1000 sekian spesies pada 209 etnis ini 1/5 (seperlima) dan pada tahun 2015 akan diteliti 280 spesies lagi untuk menilai apakah ada spesies nyamuk baru, tikus baru, kelelawar baru dan penyakit apa yang mereka tularkan. Ini dikumpulkan dalam 3 tahun sejumlah ini.

Kami juga punya penelitian Bapak dan Ibu sekalian, dari kaca mata ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran ini penelitian yang sangat akurat karena ini diikuti ke depan (tidak jelas) jadi ada anak yang diikuti selama 18 tahun sejak dalam kandungan, kemudian anak itu lahir sampai anak itu besar, apa yang terjadi pada anak itu dari dalam perut ibunya sampai lahir, sampai 18 tahun, ini dilakukan di Bogor ya, begitu juga PPM usia 25-65 tahun ini 5000 orang diikuti selama 10 tahun, apakah selama 10 tahun penyakit macam-macam muncul? Ini yang sudah saya sampaikan bagaimana pencatatan dan pelaporan sebab kematian, begitu juga stroke, stroke ini adalah penyebab nomor satu kematian di Indonesia, kami mencatat 5000 sample stroke di seluruh rumah sakit. Selama ini Kementerian Kesehatan sudah mendapatkan 13 hak paten yang saya sudah tuliskan disitu dan 6 buah hak cipta yang sudah kita dapatkan dan sekarang untuk proses paten dan hak cipta lainnya.

### **Ibu Pimpinan, Bapak dan Ibu yang saya hormati.**

Demikian presentasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

### **KETUA RAPAT :**

Tadi ada nyamuk, tikus, kelelawar ini menarik untuk kita dalami, boleh bagi-bagi kuotanya. Kepada Rekan-rekan Komisi IX DPR RI yang akan melakukan pendalaman, di meja saya ini sudah ada 8 (delapan) penanya, kita mulai dengan Ibu Siti Masrifah silakan.

### **F-PKB (Dra.Hj. SITI MASRIFAH, MA) :**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Salam sejahtera untuk kita.

**Yang kami hormati Pimpinan Komisi IX DPR RI beserta seluruh jajaran Bapak dan Ibu yang ada di Komisi IX DPR RI.**

**Badan PPSDM dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang saya hormati beserta seluruh jajaran yang hadir.  
Bapak/Ibu yang kami hormati,**

Ada beberapa hal yang ingin saya kritisi dari materi yang sudah ada di tangan saya, yang pertama, saya rasa-rasaan ini sama Mbak Okky ini berapa anggarannya, punya Pak Usman ini. Yang kedua, punya Balitbangkes, yang kedua, Bapak dan Ibu yang saya hormati dari kedua Bapak yang hadir badan yang hadir sekarang ini, saya melihat bahwa apa yang disampaikan ini hanya anggaran secara garis besar, rincian program ada tetapi tidak ada mata anggaran yang dicantumkan disana, padahal tadi karena kami ini penasaran, Teman-teman Komisi IX DPR RI sempat menanyakan ke komisi yang lain, kalau lagi membahas APBNP itu yang mereka terima apa? Mereka mengatakan terima sampai satuan tiga bahkan, nah untuk itu sekali lagi kami sampaikan ini seperti yang terdahulu ada banyak hal sesungguhnya yang ingin kita tanyakan kami tidak ingin mendapatkan secara global tiap usulan kegiatan tetapi hanya garis besarnya saja, sedangkan mata anggaran yang kecil-kecil kita tidak tahu padahal Bapak dan Ibu hadir di forum yang mulia ini mendapatkan persetujuan dari Komisi IX DPR RI, karena itu sekali lagi kami minta dari kedua Bapak yang ada di depan untuk memberikan rincian anggaran dari setiap kegiatan yang dibuat.

Yang kedua, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak di penelitian kesehatan, saya ingin menanyakan Pak penelitian ini apakah melibatk organisasi masyarakat atau tidak, itu satu. Yang kedua, kalau melibatkan dimana itu posisi Ormas tadi begitu. Yang ketiga, setiap mata anggaran saya lihat, setiap kegiatan penelitian misalnya bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan Bapak mencantumkan anggaran dan beberapa *item* yang akan diteliti, karena sekali lagi tidak ada mata anggaran yang dicantumkan tiap *item* yang akan diteliti maka saya kasih contoh satu saja ini misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan bio medis Bapak mencantumkan 135.274 miliar, kemudian di ujung presentasi itu Bapak sebutkan ada publikasi karya tulis ilmiah sebanyak 20 artinya karena saya tidak tahu anggaran yang Bapak cantumkan maka saya mengira-ngira sendiri dan ketemu angka setiap satu karya ilmiah itu sebesar Rp.6.763.705,- (*Enam Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Tujuh Ratus Lima Juta Rupiah*), nah karena itu karena kami tidak tahu jadi sekali lagi kami mohon kepada dua Bapak yang hadir untuk mencantumkan mata anggaran yang ada di setiap penelitian yang Bapak sebutkan itu.

Kemudian, masih tetap di Bapak Balitbangkes banyak hasil penelitian yang akan output hasil penelitian yang nanti Bapak akan teliti ini saya ingin tahu sampai sejauh mana kalau yang kemarin ya itu tindak lanjut dari apa yang sudah diteliti begitu. Nah, tadi disampaikan kalau penelitian purwaceng Bapak-bapak tidak suka menelitinya tetapi ingin tahu hasilnya kan Pak? Nah, kalau kemudian ini percuma diteliti kemudian hasilnya atau rencana tindak lanjut kami ingin tahu yang sudah itu seperti apa. Kemudian, tadi titipan dari Bapak Pimpinan ada tikus, ada lalat, ada nyamuk ini berapa tikus, satu nyamuk katanya Pak Pius mau mensupply berapa yang dibutuhkan, tidak Pak ini hanya bercanda Pak, karena tadi Bapak mengatakan tensinya akan lebih tinggi tetapi kalau Teman-teman

yang Komisi IX DPR RI ini tensinya tinggi tergantung dari Bapak berdua ini yang di depan.

Sekali lagi kalau memang, saya mohon maaf kalau ada yang kurang enak dari ucapan saya tetapi sekali lagi kami ini Komisi IX DPR RI punya hak untuk mengetahui anggaran yang akan dikeluarkan, karena kami akan menyetujui itu jika kami tahu persis apa yang akan kami setuju, sekali lagi itu.

Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

Baik, selanjutnya Ibu Okky Asokawati silakan.

**F-PPP (Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si) :**

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI yang saya hormati.  
Bapak Kepala Badan PPSDM yang saya hormati, Bapak Kepala Balitbangkes yang saya hormati beserta jajarannya.**  
*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pertama, mungkin saya akakn menyoroti Bapak Kepala Badan PPSDM, berbicara mengenai nakes ini memang sesuatu yang sangat diperlukan oleh negara ini dan berbicara dengan pekerjaan kita saat ini, hari ini sebagai Anggota dengan kerjanya adalah mengawal anggaran, saya melihat bahwa hal itu tidak *matching* dengan apa yang Bapak paparkan, dengan apa yang akan menjadi pekerjaan kita nanti. Karena seperti yang sudah diutarakan oleh rekan saya yang terdahulu yaitu Anggota Dewan yang terhormat yaitu Ibu Siti Masrifah bahwa tidak ada mata anggarannya sehingga saya bertanya baik Pak Usman maupun Pak Professor ini kalau sudah seperti ini, ini satuan satu, apa satuan dua, apa satuan tiga kalau seperti ini melalui Pimpinan?

**KETUA RAPAT :**

Silakan Pak Usman dan Prof mungkin bisa menjawab.

**F-PPP (Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si) :**

Ini satuan apa satuan satu, satuan dua atau satuan tiga?

**KEPALA BALITBANGKES :**

Menurut yang menguasai anggaran ini satuan satu dan satuan dua.

**F-PPP (Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si) :**

Baik, terima kasih Prof.

Karena ketika Anggota Dewan dimana salah satu TU Poksinya adalah mengawal anggaran Eksekutif maka kami bisa melihat sampai satuan tiganya karena berbicara mengenai APBN itu adalah sebuah undang-undang dan ketika kita berbicara mengenai undang-undang tentu segala aspek yang rinci perlu kita ketahui, jadi sekali lagi melalui Pimpinan saya berharap agar kedua Bapak-bapak di depan beserta jajarannya bisa memberikan satuan tiganya terkait dengan ini adalah undang-undang tetapi saya akan coba bekerja saat ini sesuai dengan apa yang saya terima, disini dikatakan untuk PPSDM jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan, apakah ini termasuk akreditasi? Semalam ketika berbicara dengan Dirjen BUK, Beliau begitu semangatnya menjelaskan mengenai akreditasi bahwa akan melakukan akreditasi 350 kecamatan dalam Tahun 2015 ini paling tidak punya 1 puskesmas, nah apakah 5 jenis tenaga kesehatan ini termasuk dalam akreditasi dan apa saja itu 5 tenaga kesehatan ini? Itu yang pertama dan bagaimana kemudian status daripada 5 tenaga kesehatan ini? Statusnya, insentifnya, apakah itu masuk di dalam anggaran yang ada di dalam anggaran yang ada di dalam Direktorat Bapak begitu. Nah, kalau begini kan kita tidak ngomong masalah anggaran, jadinya saya hanya bisa mengawasi pengawasan saja tidak ngomong anggaran, padahal hari ini kita kan kerja untuk anggarannya, ini jelas Pak ya bahwa anggaran sama pengawasan menurut saya itu memang perlu dijelaskan bedanya.

Saya lalu juga tidak menyoroiti mengenai tim yang tadi nusantara sehatkah, Indonesia sehatkah, bagaimana status dari (tidak jelas) karena seperti kita ketahui bersama untuk mengirim bidan saja, dokter, tenaga kesehatan yang lain, perawat ke daerah itu kan keteter-teter begitu ya APBDnya sendiri daerah juga masih berat untuk melakukan hal itu, nah lalu dengan tim ini bagaimana insentifnya, statusnya apakah itu berada di dalam wilayahnya Pak Usman? Saya juga tertarik dengan pelaksanaan intensif tenaga kesehatan 250 miliar dimana program intensif dokter Indonesia itu targetnya di Tahun 2015 ya Pak Usman Pak PPSDM itu 6500 dokter, saya coba ngitung 6500 dokter dengan 250 miliar per orang itu kurang lebih 40 juta, nah pertanyaan saya itu berapa lama program intershipnya, kemudian apakah 40 juta itu menutup atau kelebihan begitu, saya ingin menyoroiti mengenai hal itu.

Lalu saya juga tertarik dengan pendayagunaan tenaga kerja warga negara asing di Indonesia, karena saya agak sentimentil karena saya lihat banyak model-model asing itu juga sekarang kerja disini Pak Usman tanpa ijin kerja yang jelas, akibatnya model-model lokal dalam tanda kutip tidak kepakai begitu padahal mereka juga mempunyai kompetensi yang sama, nah yang ingin saya tanyakan adalah pendayagunaan tenaga kerja WNA di Indonesia itu ada targetnya 300 rekomendasi, pertanyaan saya berapa sih bikin satu rekomendasi dan berapa biayanya, karena ketika sudah ada kan kita memang harus segera mensosialisasikannya dan dimana saja begitu. Ini juga menarik untuk saya tanya yaitu pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, ini tidak jelas mata anggarannya cuman ada 38 satker, saya ingin lebih rinci mengenai hal ini.

Juga mengenai pelatihan tenaga kesehatan dan masyarakat itu usulan tambahan anggaran Tahun 2015, yang saya tertarik adalah



pelatihan masyarakat, nah ini masyarakat yang dimana yang hendak dilatih dan output dari pelatihan masyarakat itu apa dan dimana.

Untuk Prof Dirjen, yang saya tahu koreksi saya kalau saya salah, Balitbangkes itu kerjanya meneliti dan hasil dari penelitiannya ini diberikan kepada Direktorat yang lain, artinya Bapak akan banyak memakan kertas atau justru sebaliknya *paper less* atau justru pakai sistem teknologi, saya ingin tahu bagaimana mekanisme atau teknisnya hasil dari pekerjaan Bapak itu kemudian didistribusikan kepada Direktorat yang lain, karena ketika itu tidak efektif atau ketika itu justru membuang-buang kertas begitu justru itu menjadi kurang bijaksana.

Saya tertarik nomer 7 tetapi sebelum nomer 7 begini, disini ada penelitian dan pengembangan bidang teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik jumlahnya 38 juta aa satu sampai 13, karena tidak ada mata anggarannya jadi saya tidak tahu Bapak memprioritaskan yang mana dan ketika kita tidak tahu Bapak memprioritaskan yang mana tentu kita tidak bisa melakukan pengawasan, jadi sekali lagi melalui Pimpinan saya minta kepada kedua Bapak-bapak Badan ini agar memberikan mata anggaran sebagai penguatan dari apa yang sudah dikatakan dari Ibu Syifa. Nah, saya tertarik nomer 7 Prof Dirjen penelitian dan pengembangan upaya penanggulangan hipertensi di tingkat posyandu, puskesmas dan rumah sakit di 3 Provinsi Indonesia itu dimana saja karena memang seperti tadi saya juga menyikapi mengenai masalah penyakit tidak menular dimana PPM ini semakin lama semakin meningkat jumlahnya. Kemudian, yang juga saya ingin tahu mengenai penelitian dan pengembangan bidang teknologi intervensi kesehatan masyarakat, penelitian dan pengembangan aplikasi mobile untuk pemantauan pertumbuhan anak balita, itu dimana begitu karena saya tertarik anak balita karena mereka nantinya yang menjadi penerus dan kalau memang kita bisa melakukan di Provinsi, di daerah yang menjadi konsentrasi kita maka itu bisa baik.

Dan yang terakhir, penelitian dan pengembangan efektivitas pelaksanaan program posyandu lansia terhadap kualitas hidup lansia, ini juga menarik karena jumlah lansia semakin banyak sekarang, lalu bagaimana nanti hasil yang akan dicapai dari penelitian tersebut. *The last but not least* saya tidak melihat disini Prof Dirjen penelitian mengenai dampak tembakau, padahal negara kita mendapat sebutan *baby's smoker country* dari negara tetangga, nyakitin banget buat saya seperti itu, kami pun kemarin mengkritisi mengenai RUU Pertembakauan yang tidak ada sama sekali Bab yang menjaga kesehatan masyarakat dari produk tembakau, saya tidak lihat mungkin bisa anda jelaskan mengapa itu tidak ada dan kalau tidak ada mungkin itu bisa diadakan. Itu saja.

Terima kasih Pimpinan.

Kurang lebihnya saya mohon maaf lahir batin.

*Wabilahi Taufik Wal Hidayah,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

Dimaafin.

Yang lain selanjutnya Pak Ali Taher silakan.

**F-PAN (Dr. H.M ALI TAHER PARASONG, SH., M.Hum) :**

*Bissmillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Nama saya Muhammad Ali Taher dari Fraksi PAN, Banten III kota Tangerang, kabupaten Tangerang, asli Nusa Tenggara Timur.

Pertanyaan pertama, dari untuk PPSDM selain sekolah-sekolah pemerintah sekolah mana saja yang dianggap bagian dari pengembangan SDM, karena sekarang ini banyak sekali swasta itu muncul seperti jamur di musim hujan, indikator kualitasnya bagaimana cara mengukurnya itu meskipun saya juga punya Stikes juga. Saya kira pertama itu.

Kedua, kita berazam, berketetapan hati untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk melanjutkan pendidikan di tanah air maupun diluar negeri, saya terharu sekali ketika punya Presiden namanya Prof. Dr. BJ.Habibie, Beliau bercita-cita dengan pesawat terbangnya itu, setiap tahun dia mengirimkan anak muda Indonesia dalam usia yang sangat muda untuk melanjutkan pendidikan sebanyak 1000 insiyur per tahun, dia bercita-cita 10 tahun kemudian akan ada 10 generasi Indonesia kembali ke tanah air menjadi soko guru pembangunan. Ketika saya membaca tulisan dalam anggaran ini kirim 300 orang ke luar negeri Pak Usman, saya merasa agak kurang pas ya dengan tingkat progresivitas pelayanan kesehatan pertama, pendekatan konstitusional Pasal 28h mengatakan *setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan* dan ekspansi program 6000 puskesmas sampai Tahun 2019, kok dokter yang dikirim ke luar negeri cuman 300, saya kira ya boleh-boleh saja tetapi saya pikir mengirim 1000 orang per tahun supaya ada indikator progresivitas peningkatan sumber daya manusia, bisa lulusan dalam negeri, luar negeri yang memiliki kompetensi sekaligus alat ukur anak-anak muda Indonesia yang berkualitas pada masa yang akan datang.

Yang selanjutnya, dari sisi pengelolaan mutu perguruan tinggi pada halaman 19, yang dimaksud 24 miliar ini mutu yang mana ini? Mutu pendidikan kesehatankah, mutu dosennyakah, mutu kurikulumnyakah dan lain sebagainya. Jadi, tadi itu hampir semua pertanyaan sudah ditanya oleh Ibu Okky, jadi saya poin-poin saja karena mutu ini indikatornya sangat banyak.

Kemudian, selanjutnya disini ada pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi di halaman 21 ada sebanyak 730 miliar, nah kita juga mengalami kesulitan untuk memahami mana saja *item cost* yang dikeluarkan dan dampak yang akan muncul itu, ada input, ada proses dan *outcomenya* seperti apa. Kemudian, pada nomer satu, dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program PPSDM sudah termasuk tadi 1,3 triliun tetapi ini rincian-rinciannya yang paling detail kita tidak dapat sehingga sulit untuk mengukurnya. Sementara hari ini betul kita bicara soal anggaran tetapi *item* anggaran tidak terlalu terbuka disampaikan kepada kita.

Litbang itu saya kira agak sulit berkembang, karena saya melihat memang kalau Profesor itu kan (tidak jelas) hampir tidak bisa membaca ini tulisan-tulisan gambar bagan disini, ya ada usulan anggaran Tahun 2015

tetapi memang tidak ada *itemnya* apa saja *item* anggaran itu. Saya kira saya bisa paham politik anggaran yang dibangun oleh Pemerintah di era Pak Jokowi sekarang ini. Ada politik anggaran yang tersembunyi menempatkan DPR RI bukan lagi sebagai apa namanya fungsi anggaran tetapi memang lebih bangun, tidak ingin DPR RI dibangun sebagai sebuah kekuatan berimbang kira-kira begitu seperti awal-awal saja dilarang untuk hadir didalam Rapat Dengar Pendapat itu kan tanda ya, tetapi bagi saya bukan persoalan karena dinamika politik tetapi ini menunjukkan bahwa keengganan eksekutif, mohon maaf saya ini tidak biasa bicara kasar jadi saya mencari bahasa yang paling mudah begitu ya, ini sepertinya ada keengganan untuk menyampaikan secara terbuka politik anggaran dari Kemenkes, ya saya melihat itu ada keengganan sehingga ketika kita ingin memberikan masukan dan juga memberikan persetujuan, yang kita setuju sendiri itu kata Mas Budi itu kita tidak tahu apa yang kita setuju. Nah, inilah yang barangkali memerlukan perhatian kita bersama diantara kita termasuk dua Badan ini dan saya mungkin melalui Ibu Ketua ini saya pikir kita harus terbukalah Indonesia baru yang kita maksudkan dalam rangka transformasi politik itu adalah Indonesia baru yang terbuka, transparan dan akuntabel dan jujur didalamnya, kalau tidak ada kejujuran itu saya kira sulitlah untuk mencapai cita-cita bersama ini.

Jadi, saya pikir ini usul saya narasi yang kita terima Ibu Ketua tetapi lampiran anggarannya belum bisa kita terima menurut saya itu, perlu kita dalam bersama-sama lagi supaya anggaran itu dari inputnya, dari prosesnya ada *output*, *outcomenya* itu betul-betul tergambar dari sekian triliun yang hendak dicapai, yang hendak dianggarkan kemudian titik capainya itu bisa terlihat, tergambar secara jelas itu sampai akhir tahun yang akan datang, syukur-syukur seperti BUK tadi malam bikinlah sebanyak 5 tahun sampai dengan Tahun 2019 kemudian kita titik capai per tahun itu ada indikator-indikator yang bisa kita nilai. Dulu Pak Harto dengan bijak mengatakan kita punya APBN namanya GBHN, itu kita bisa lihat sekarang kok tidak ada, dulu ada, tetapi sekarang tidak ada sama sekali sehingga Profesor mohon maaf hasil penelitian tadi itu saya juga belum melihat apa hasil yang telah dicapai, manfaatnya untuk apa, bagaimana penghargaan yang mereset-reset yang bagus itu sehingga saya lebih dari 30.000 lebih hasil karya anak-anak Indonesia diberbagai bidang itu sudah dipatenkan tetapi tidak digunakan kan sayang sekali itu.

Kemudian, riset-riset mengenai farmasian saya kira jangan fokus di Jawa saja, riset-risetnya itu sampailah di Papua misalnya Balai-balai kita misalnya tidak hanya di Jawa tetapi ada di, kalau Pak Hatta dulu itu ada programnya yaitu MP3I di enam koridor, kira-kira enam koridor itu misalnya kita punya program balikes itu sehingga potensi alam kita bisa lakukan riset disitu. Saya kebetulan punya sekolah tinggi farmasi, punya kurang lebih sekitar 20.000 meter persegi untuk riset farmasi, sekolah tinggi muhammadiyah itu masih kecil tetapi kita punya bagus sekali cita-citanya. Saya kira ini Litbang dan oleh karena itu, anggaran per *itemnya* itu perlu dibuat betul detail kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara norma-norma keuangan, sekali lagi ya kita tidak boleh juga malu untuk mencontoh negara lain, berapa pun besar biayanya tolonglah hasil-hasil karya anak bangsa lewat riset itu bisa dihargai. Saya terharu ketika teman saya direktur Puspitek mengirim orang kemudian menjadi ahli nuklir pertama kali

Tahun 1980an pulang ke Indonesia itu tidak dihargai dan dia tinggal di Bogor, pergi ke Puspitek itu naik angkot kemudian tidak dihargai kompetensi ilmu pengetahuan yang dimiliki. Mulai dari situ saya merasa bahwa (tidak jelas) membangun SDM itu tidak sungguh-sungguh, apalagi bidang kesehatan.

Oleh karena itu saudaraku sekalian, mohon sekali lagi kedua bidang ini ditelaah betul anggaran narasinya, saya pribadi dari Fraksi PAN menyetujui narasinya tetapi anggarannya belum kita lihat lagi, belum kita bedah ke dalam bentuk kegiatan-kegiatan satuan program supaya lebih fokus, lebih rasional, lebih proposional, fokus kepada pencapaian-pencapaian anggaran, saya kira demikian Ibu Ketua, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

Baik, di meja saya masih ada 6 (enam) penanya, jadi saya pikir kalau memang bisa dipersingkat, kemudian khusus untuk anggaran ini akan sangat membantu karena kita masih punya agenda untuk Dirjen Binpar dan Alkes, kemudian Irjen dan Sekjen dan nanti malam kita harus melaksanakan Raker di Senayan, jadi mungkin kalau kita bersepakat kita peringkas kemudian khusus untuk melakukan pendalaman untuk anggaran saja.

Silakan selanjutnya..

**F-PG (H. BUDI SUPRIYANTO, SH., MH) :**

Interupsi.

Terima kasih Pimpinan.

**Bapak Kepala Badan PPSDM dan Balitbangkes serta jajarannya.**

Kalau tadi beberapa rekan saya menyampaikan intinya tidak jelas anggaran ini tidak terlalu rinci, intinya itu sebenarnya tetapi fokus akan saya ulangi Bapak, kalau tadi pertanyaan dari Ibu Okky yang Bapak sampaikan ini adalah satuan satu dan satuan dua, saya ambil contoh menurut pandangan Bapak yang termasuk satuan tiga kayak apa sih, jadi saya ingin mengerti jadi jangan sampai nanti berbeda pandangan antara DPR RI dengan mitra kerja kita tentang istilah satuan satu, satuan dua, satuan tiga ya itu penting, karena memang ada yang mengatakan satuan tiga itu rinci, misalnya Pak Usman bangun gedung Poltekes Semarang anggarannya Rp.10 miliar, itu tidak dihitung pondasinya berapa, (tidak jelas) berapa, ini satuan tiga. Tetapi ada juga yang berpendapat mencantumkan angka 10 miliar itu sudah satuan tiga. Ini saya ingin tahu Pak supaya pandangan kita sama, teori kita sama karena di mitra kerja kita yang lain juga berbeda ini, Teman-teman di komisi lain bilang bukan itu, ini penting Pak, karena kalau saya pribadi pun juga belum puas tentang apa yang disampaikan, saya yakin saya tidak bisa bahas, tidak mudeng karena misalnya 125 miliar untuk ini, ini tetapi masing-masing *item* tidak dijelaskan untuk apa, padahal saya sangat respek dengan jamu tradisional misalnya

Litbang misalnya kenapa itu tidak digedein misalnya, nah ini perlu *reasoning-reasoning* yang nantinya akan kita tanyakan, kalau kemudian kayak begini ini kita nanti susah mending diperbaiki dulu Pak, jadi Teman-teman pegangannya arahnya pembahasan itu mau kemana.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT :**

Baik, kita selesaikan dulu ya.

Ada Pak Iqbal silakan.

**F-PG (ADITYA ANUGRAH MOHA, S.Ked) :**

Interupsi dulu Pimpinan.

Jadi, saya hanya ingin menambahkan, menguatkan apa yang disampaikan oleh Pak Budi tanpa mengelimenir apa yang telah Kawan-kawan daftar tetapi kan pada prinsipnya sesungguhnya kita ingin hemat waktu dan efektif kita membahasnya, prinsipnya kan kalau kita bisa ambil, mensitir dari apa yang Kawan-kawan sampaikan prinsipnya kan satu kita belum bisa membahas secara detail ketika kita belum tahu rincian dan postur dari apa-apa yang menjadi *floating* program dan anggarannya. Ini akan sangat terkait Pimpinan karena ini kan kita tidak hanya bahas untuk Tahun 2015, saya pribadi sesungguhnya menginginkan evaluasi yang kemarin, targeting yang tahun kemarin hari ini hasilnya seperti apa agar jelas, jadi keberpihakan politik anggaran kita berada pada *on the track*, posisi obyektifnya yang mana yang harus kita berikan *reward*, mana yang kita harus tahan, nah ini kan kita perlu gambaran tahun kemarin seperti apa dan tahun ini seperti apa, saya pribadi menginginkan itu, nah bagaimana kita masuk dalam postur hari ini yang sesungguhnya sama yang dikatakan Pak Budi adalah ini hanya dalam sifat gelondongan, saya memahami bahwa ini kita membutuhkan namanya saja kita membahas anggaran, nah anggaran ini tentu kita harus *debatablenya* bicara penguatannya soal poin per poinnya dan angka per angkanya, tidak hanya dalam kaitan globalnya itu kalau dalam pemahaman saya, persoalan ada keputusan MK dan sebagainya itu persoalan lain tetapi ini adalah persoalan komisi kita yang kita bertanggung jawab resmi, bertanggung jawab langsung terhadap apa yang menjadi perjuangan kita terkait dengan Undang-Undang MD3 kan begitu.

Nah, ini yang perlu ada yang selalu saya sampaikan persepsi kita harus sama itu, itu yang saya sampaikan kemarin waktu didalam Rapat Kerja persepsi kita harus sama, persepsi dalam semua kaitan dari fungsi pengawasannya, fungsi budgetingnya sampai kepada pembuatan undang-undang, tidak bisa persepsi kita menurut hemat kita kerjakan menurut hemat kita, kita harus sama dan harus duduk dalam kerangka itu, nah inilah yang menurut kami ini belum sama persepsinya sehingga tanpa mengurangi rasa hormat giliran dari Kawan-kawan untuk bertanya tetapi menurut kami sebaiknya ini butuh ada detail dulu agar kita tidak membuang-buang waktu dalam proses pembahasan, jadi kita memintakan dulu apa yang menjadi harapan kita rinciannya biar sama dalam

pembahasan dan persepsi kita baru kita lakukan agar lebih efektif itu, karena kita waktunya sudah tidak mencukupi itu.

Demikian Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih.

Ini karena sudah ada Teman-teman yang mendaftar dan kemudian akan menggunakan haknya untuk bertanya kita selesaikan dulu ya, mungkin juga akan menarik silakan.

Pak Iqbal silakan.

**F-PPP (H. MUHAMMAD IQBAL, SE., M.Com) :**

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Rekan-rekan Komisi IX DPR RI,  
Yang saya hormati Bapak Badan PPSDM dan Kepala Balitbangkes  
serta seluruh jajarannya.**

Tadi Bapak-bapak sudah menyampaikan paparan kepada kita tetapi saya sangat menyayangkan bahwasannya ternyata Badan PPSDM dan Balitbangkes ini tidak mendapat tambahan anggaran di APBNP, itu sangat menyedihkan sekali padahal kita tahu bahwasannya PPSDM ini mempunyai peranan yang sangat penting di dalam pengembangan sumber daya tenaga kesehatan yang ada, kemudian Balitbangkes juga mempunyai peranan yang penting di dalam melakukan penelitian, saya berharap semoga nanti di forum ini kita bisa mengusulkan adanya anggaran untuk APBNP bagi Badan PPSDM dan Balitbangkes. Kemudian, kaitannya dengan anggaran Pak saya juga sangat menyesalkan mengapa paparan yang Bapak sajikan ini menurut kami tidak detail seperti yang disampaikan oleh Teman-teman kami tadi artinya kejadian ini berulang pada waktu kita membahas APBN ini tahun lalu, kita masih ingat pada periode yang lalu itu terjadi ketidakcocokan di antara kita karena memang tidak ada kesepakatan mengenai sajian yang kami terima, bukannya kami ingin mendapatkan angka detail itu, tidak tetapi kami melakukan pengawasan, pengawasan terhadap anggaran yang akan kami setujui. Kami berharap semoga ke depannya kalau nanti ada persetujuan dari forum ini untuk menambah anggaran di APBNP Bapak bisa memaparkan yang dikatakan teman saya tadi mungkin satuan tiga, satuan dua dan lainnya tetapi kami ingin tahu rinci artinya anggaran yang sekian ratus miliar itu mungkin kemana saja, kemudian programnya apa saja, sebarannya dimana saja, mungkin seperti itu.

Lalu kemudian yang kedua Pak, Kepala Badan PPSDM ini saya bertanya kaitannya dengan anggaran yang cukup besar juga untuk program intensif, ini kalau saya tidak salah itu Rp.250 miliar untuk 6500 dokter intensif ya. Nah, saya ingin bertanya yang pertama, apakah dengan dana sebesar ini program intensif ini sudah sesuai dengan target kita artinya Dokter-dokter yang ikut intensif itu memang setelah ikut intensif mereka memiliki skill atau kemampuan atau tidak atau program ini akan

sia-sia saja karena anggaran cukup besar sekali. Kemudian yang kedua, apakah setiap dokter intensif itu mendapatkan honor yang sama atau tidak atau berbeda-beda dimana dia ditempatkan atau setiap kabupatennya, mungkin itu.

Kemudian, yang lainnya juga mengenai anggaran Rp.150 miliar untuk penyelesaian gedung mangkrak tadi, saya sepakat seperti yang dikatakan oleh rekan saya Pak Budi tadi kami ingin tahu anggaran Rp.150 miliar untuk penyelesaian gedung mangkrak ini, ini seperti apa kemudian gedungnya dimana lalu apa targetnya setelah kita selesaikan program ini apa targetnya, outputnya seperti apa karena Bapak tidak menjelaskan secara rinci, saya kira hanya itu saja Pimpinan, tetapi sebelumnya saya berharap kita pending dulu mungkin dalam kesimpulannya karena tadi permintaan Teman-teman adanya rincian dari anggaran tadi, walaupun kita tahu bahwasannya ini telah disahkan DPR RI ini memang anggaran Tahun 2015 itu, kita sama-sama tahu DPR RI sudah mensahkan ini walaupun Komisi IX DPR RI waktu itu mempending tetapi secara umum DPR RI dan Pemerintah sudah setuju tetapi tidak ada salahnya jika disajikan lagi bagi Teman-teman kita sehingga kita tahu karena memang untuk anggaran Tahun 2015 ini saya yakin sekali belum semua program yang dilaksanakan, masih ada program-program yang berjalan bahkan mungkin belum. Oleh karena itu, alangkah baiknya kalau dalam penyajian ini diterangkan secara rinci sehingga kami jelas kemana arahnya anggaran yang kami setuju nanti.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih.

Ibu Irma silakan.

**F-NASDEM (IRMA SURYANI CHANIAGO) :**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Ketua.

Kepada Balitbangkes ini masalah yang terkait dengan penelitian dan pengembangan paparan bahan kimia berbahaya yang berasal dari makanan, apakah ini tidak tumpang tindih Pak dengan program BPPOM, ini perlu menjadi catatan, kemudian penguatan terhadap penelitian dampak rokok tadi yang disampaikan Kakak Okky juga bisa ditindaklanjuti.

Dan yang terakhir masalah peningkatan (rekaman terputus) sekitar Rp.637 miliar, nah saya tidak melihat programnya apa saja, tadi semua Kawan-kawan sudah ribut masalah terkait rincian anggaran dan programnya yang tidak jelas disini, saya hanya ingin sampaikan kepada Bapak-bapak semua dari Kemenkes sebaiknya nawacita itu diiringi dengan nawaitu yang baik, sehingga tidak menjadi nawaurbah Pak, ada penghormatan antara Teman-teman dan kami sebagai Anggota DPR RI karena fungsi kami memang harus melakukan pengawasan terhadap semua anggaran yang Bapak mintakan kepada kami untuk disahkan, jadi kalau tidak ada penghormatan dari Bapak-bapak terhadap kami untuk bisa

melihat program ini untuk bisa kita sahkan gimana kita mau mensahkan, bagaimana kita mau ketok palunya kalau dari Bapak-bapak sendiri tidak ada keterbukaan kepada kita begitu, ini perlu digarisbawahi sehingga kerja sama dan koordinasi diantara kita bisa terjalin dengan baik untuk Indonesia lebih baik ke depan. Saya kira itu saja Ketua.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, selanjutnya Pak Handayani silakan.

**F-PKB (H. HANDAYANI, SKM) :**

Terima kasih Pimpinan.

Langsung saja, sudah disampaikan oleh Teman-teman juga yaitu masalah perbaikan Poltekes itu lokasinya dimana-mana saja ada 14 dan juga di Jambi itu Poltekesnya itu sudah tanggung Pak belum selesai. Yang selanjutnya, masalah Dokter Spesialis sekitar 1000 orang, perlu Bapak ketahui mungkin sudah tahu juga bahwa mau tes Dokter Spesialis ini di Perguruan Tinggi kalau ada surat rekomendasi, ada biaya itu diterima Pak, bagaimana kami-kami disini ini ada dapat rekomendasi untuk warga kami di Dapil-dapil kami masing-masing nantinya rekomendasi bahwa mereka dibiayai oleh Menteri Kesehatan untuk ambil spesialis.

Yang selanjutnya, untuk penjenjangan dari desa ke D3, saya tidak begitu setuju Pak dan juga bertentangan dengan Menteri Pendidikan yaitu masalah pendidikan jarak jauh itu sudah tidak boleh lagi Pak, jadi kalau kita mau menyekolahkan dari desa ke D3, kita langsung di perguruan tingginya apa yang disampaikan oleh Pak Ali tadi saya juga punya Stikes kebidanan, kalau bisa di sekolah saya juga bisa disekolahkan, mungkin itu saja Bu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terakhir, Pak Djoni silakan.

**F-HANURA (Capt. DJONI ROLINDRAWAN, SE., M.MAR, MBA) :**

Terima kasih Pimpinan.

Saya Djoni Rolindrawan Fraksi Hanura, Dapil Jabar III meliputi kota Bogor dan kabupaten Cianjur.

**Yang saya hormati Kepala Bada PPSDM dan Kepala Balitbangkes beserta jajarannya.**

Kalau tadi dengar dari rekan kami yang terdahulu ini adalah pengulangan dari peristiwa juga tahun lalu yang menterinya sudah berbeda, jadi mungkin ini bukan kebijakan Ibu Menterinya, jadi memang di level dibawahnya, mudah-mudahan saya keliru seperti itu. Jadi, kalau saja memang tidak diberikan data rinci nanti mohon dimasukkan kepada kesimpulan bahwa Komisi IX DPR RI menerima usulan anggaran



tambahan tetapi tidak dapat memahami karena ketidaklengkapan rincian seperti itu. Kemudian, saya kira tidak banyak yang saya sampaikan karena memang kalau ditanyakan juga tidak akan terjawab, saya kira itu. Yang lebih mengherankan itu kami selaku Anggota DPR RI yang mempunyai hak anggaran itu tidak mengetahui sementara di Dapil kami itu sudah banyak yang tahu gitu loh, bagaimana ini bisa terjadi, jadi angka-angka itu sudah tayangan begitu walaupun tidak seluruhnya, kalau disini kan secara nasional, sedangkan yang gentayangan itu hanya Dapil-dapil tertentu, Kepala-kepala Daerah tertentu seperti itu.

Begitu Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih.

8 (delapan) penanya, kebetulan Pak Imam menarik tidak bertanya.

**F-PDIP (NURSUHUD) :**

Tambahan sedikit saja.

**KETUA RAPAT :**

Oh silakan.

**F-PDIP (NURSUHUD) :**

Terima kasih.

**Bapak dari Litbangkes dan PPSDM yang saya hormati.**

Apakah yang Bapak rencanakan itu memang sudah sesuai dengan Riskesdas kan begitu, karena di beberapa Kementerian dan juga di periode lalu sering bahwa Riskesdas itu selesai sebagai Riskesdas saja, padahal semestinya Riset Kesehatan Dasar itu menjadi kesehatan dasar di dalam perencanaan anggaran dan nanti tertuang di dalam sampai angka-angka kan begitu, bukan sesuatu yang lepas begitu saja, artinya kan pasti ada pemerataan anggaran, problem yang harus dijawab kayak apa dan ada sesuatu yang sifatnya *insidental* ketika Riskesdas sudah lewat pada saat perencanaan anggaran mulai Bapak-bapak dan Ibu susun, kan begitu. Nah, karena itu kami mohon seandainya memang ini belum ini ya kita mesti bicara ulang, tidak bisa menyusun anggaran itu tidak memakai data yang ini. Ada pejabat eselon 1 saya ingat pembahasan sekitar tahun Tahun 2008 atau 2009 ketika saya tanya data dari Balitfo itu apa kaitannya sama program di setiap Direktorat Jenderal, kebetulan presentasi Kepala Balitfo itu terakhir dan catatan yang menarik bahwa Balitfo mengatakan bahwa apa yang kami kerjakan itu menjadi dasar di Kementerian kami dan Dirjen-dirjen sebelumnya dengan super yakin mengatakan angka ini tidak muncul tiba-tiba, ada perencanaan yang matang tetapi ada dua Dirjen yang

barangkali lupa ketika muncul angka saya tanya, ini karena tekanan Bupati daerah ini, ini karena Gubernur Pak lewat menteri ini, ini ada KNTI dan tokoh masyarakat yang meminta program ini dan lain sebagainya. Artinya apa yang direncanakan lewat kalau di Kementerian Kesehatan lewat dasar-dasar di data Reskesdas itu dan data lain kemungkinan tidak tertuang juga. Nah, karena itu saya ingin bertanya sudahkah Bapak berkordinasi sama eselon 1 yang lainnya dengan cermat yang dasarnya pasti Riskesdas begitu, kalau Kementerian Naker Trans pada saat itu data dari Balitfo, ya ternyata data dari Balitfo itu sama sekali bukan dasar ini, sangat parsial di dalam menyusun programnya. Nah, sebelum kita ngomong tentang detail angka pasti ngomong relevansi program dan kebutuhan itu kayak apa, ini kan tidak bisa tiba-tiba muncul data, ini daerah ini, mengapa ini tidak apa dasarnya yang ini kan begitu.

Yang terakhir, apakah Bapak merasa akurat benar Riskesdas itu Pak? Dan saya ingin tanya Pak metodologinya apa yang Bapak pakai, metode apa, berapa jumlah peneliti di lapangan dan apa background mereka? Karena pernah, boleh nanti di catatan Rapat Komisi IX DPR RI di periode lalu ada ketika Kepala Balitfo saya tanya metodologinya kayak apa pak, dia bingung metodologi itu apa, boleh nanti di *cross check* Pak Usman itu, artinya ini kerjaan rutinitas yang tidak pernah menguji lagi tentang metodologi untuk percetakan akulasi data, jadi itu Pak pertanyaan kami dan kalau memang belum sinkron ya pasti tidak dijawab disini, jadi kami tidak mau pengalaman dulu Kemenakertrans itu menjawab begitu saya kejar benar dikira kita tidak tahu metodologi karena *backgroundnya* saya penelitian dimengertikan itu dan sekali lagi Pak itu apa yang dipakai metodologinya kayak apa dalam hal ini, kalau ada disini salah satu peneliti saya ingin tanya langsung, saya secara informal kebetulan sering ngobrol-ngobrol dengan anak buah bapak kayak apa metode yang dipakai sebenarnya dan cara ambil samplingnya dan asumsi-asumsi dasar sosialnya kayak apa ketika menghimpun data, saya segera dapat data dan saya ingin *cross check* tolong salah satu yang ada disini menyampaikan ini penelitiannya disini, di kabupaten ini, ini, saya akan *cross check* dengan data yang kami pegang karena saya sampai hari ini masih hampir komunikasi sama kawan-kawan yang NGO yang fokusnya kesehatan masyarakat para peneliti itu dan itu latar belakang kami Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik,

**F-PAN (HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN, SH) :**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Ya silakan.

**F-PAN (HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN, SH) :**

Terima kasih Pimpinan.

Hang Ali Saputra Syah Pahan A-499 daerah pemilihan Kalimantan Tengah.

Jadi, ini kebetulan sebenarnya saya tidak ada niat mau tanya atau menyampaikan sesuatu tetapi kok rasanya tidak bisa ditahan-tahan ya. Jadi, pada Tahun 2012 Komisi IX DPR RI berkunjung ke Kalimantan Tengah disitu kita melihat ada satu bangunan yang sedang dibangun dan menjadi satu permasalahan Poltekes, begitu kita usut-usut, kita tanya-tanya ternyata mereka bilang kepada kami "*kami dulu tidak mengusulkan begini Pak, yang kami usulkan hanya yang waktu itu karena ada kerusakan-kerusakan di toilet-toilet tetapi ternyata kami disurun bikin perencanaan baru, dibongkar semua itu bangunan sampai hancur habis dan dibangun*", akhirnya mangkrak, ribut. Nah, saya ingin tahu sampai sejauhmana perkembangan permasalahan itu, nah kenapa saya sengaja ungkapkan sekarang dan pada hari ini, daripada perencanaan yang dibuat asal-asalan, itu satu.

Yang kedua, kita di Komisi IX DPR RI menyetujui anggaran yang kita tidak ketahui, sampai saya dikatakan pada waktu itu percuma Bapak ada di Komisi IX DPR RI apa yang Bapak perjuangkan terhadap daerah, apa yang dikerjakan kok tidak tahu, bangunan sudah hancur menjadi bangunan baru tanpa penghapusan inventaris, bangunan dihancurkan dibangun baru, yang lama tidak dihapuskan dalam daftar inventaris, bukan rehab tetapi bongkar total, nah ini permasalahan. Kembali kepada apa yang kita bicarakan saat ini termasuk yang lain-lainnya juga, saya sendiri bingung, kalau kita menyetujui anggaran yang kita tidak ketahui mohon maaf untuk kali ini saya tidak mau terlanjur lagi tercebur kepada hal yang sama, bagaimana kita mau menyetujui anggaran yang kita tidak ketahui kemana arahnya, mau dikerjakan sebagai apa, kita tidak mau mengetahui *oh semen harganya 1 sak nya berapa*, bukan itu, yang harus kita ketahui sasarannya dimana. Nah, permasalahan yang terjadi sekarang pada waktu itu saya masih belum mengerti juga tidak tahu ada pembangunan dibidang rehab berat padahal bukan rehab berat, lantainya abis, dindingnya abis, berdiri bangunan baru, saya sendiri sampai saat ini juga merasa bagaimana jadi tidak melihat lagi apakah itu sudah selesai permasalahannya atau tidak, karena kemarin saya cek itu sampai di Kejaksaan Tinggi, nah apakah hal-hal itu berlaku terus. Jadi, saya harapkan bagaimana paling tidak kita mengetahui ada kaitannya dengan tugas kita nanti sebagai pengawasan, apa dikerjakan itu sudah ada atau tidak, masyarakat mengatakan percuma anda jadi seorang Anggota DPR RI, duduk, datang, dengar, diam dan duit tetapi apa yang anda kerjakan tidak jelas, masa di daerah kami ada pembangunan anda tidak tahu, nah ini yang menjadi masalah, bagaimana pun juga kita harus tahu, apabila kita sudah ketahui tidak salah kita akan memberikan persetujuan karena kalau kita tidak mengetahui memberikan persetujuan mohon maaf untuk kali ini saya nyatakan kami secara pribadi sebagai anggota maupun sebagai Poksi Partai Amanat Nasional tidak dapat memberikan persetujuan tanpa ada hal-hal yang kami ketahui.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Baik, jadi memang dari tadi pagi dan khususnya siang ini itu kan Teman-teman Komisi IX DPR RI berharap betul jelas arahnya, kemudian apa dasarnya, yang paling penting juga tadi rincian karena hak pengawasan yang harus dilakukan oleh Teman-teman ini tidak bisa dilakukan kalau itu tidak jelas dan tadi yang lebih menarik lagi adalah apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan satuan tiga menurut Kementerian Kesehatan, ini perlu dijelaskan agar kita bisa paham kenapa angka-angka itu tidak disampaikan atau target-target itu disampaikan dalam pertemuan ini. Sekarang kesempatan bagi Pak...

**F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc) :**

Sebentar Pimpinan, sedikit saja.

**KETUA RAPAT :**

Silakan.

**F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc) :**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ansory Siregar dari Fraksi PKS, Dapil Sumatera Utara III.

Halaman 20 Pak Usman, yang ada tim basic itu ada 120 puskesmas dan kalau tidak salah ada 24 kabupaten kota, ini melalui Pimpinan, saya mohon ini untuk 120 puskesmas ini per puskesmas Rp.1 miliar begitu, apakah nanti bapak yang nyisir atau kita yang nyisir? Terserah Bapak, apa kita ambil dari Dirjen yang lain dan itu sering kita lakukan, penampil pernah kita lakukan karena ini di perbatasan, kita harus menjaga image Indonesia disini, apakah mungkin diambil dari nomer 1, terus saya mohon disini untuk di puskesmasnya itu apalagi ini tim nusantara itu 120 puskesmas, jadi dia walaupun sudah dibangun entah alatnya, tenaganya atau apanya mohon dimasukkan kesini anggaran, Rp.1 miliar per puskesmas.

Yang kedua Pimpinan, untuk itu tadi untuk yang Balitbangkes Pak Chandra, sebenarnya anggaran Bapak sebenarnya ada disini kecil sekali dari presentase ya, apalagi penelitian demi penelitian begitu, tetapi seperti tadi Teman-teman bilang saya sebenarnya sangat mengusulkan Pimpinan secara garis besar minimal Rp.1,5 Triliun, kita sudah baca dari sebelum-sebelumnya itu, entah disisir dari mana atau darimana tetapi kami mohon mungkin bahan catatan kita ke Menteri bahwa Balitbang ini harus di, jadi ini fokus Pimpinan jadi ini termasuk istilahnya preventif dan anggaran-anggaran preventif kita disini masih jauh dari ini, kuratif-kuratif, walaupun kuratif penting tetapi preventif itu lebih penting begitu. Secara garis besar disini ya yang disebutkan tadi, memang ini sudah disuarakan terus menerus di Balitbang ini saya tidak tahu juga sudah kita suarakan kemana ini badan apa namanya kalau di Kemenkes itu sudah disuarakan oleh DPR RI tiap tahun ini Balitbang ini tetapi kok kenapa anggarannya masih karena

menurut saya masih belum sesuai ininya, masih belum seluruh Indonesia ya?

Itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

Baik, sebelum meneruskan saya mohon persetujuan untuk kita memperpanjang waktu karena tadi sampai jam 4 dan sekarang sudah jam 4, berapa lama kita akan perpanjang sampai kesimpulan? 30 menit ya?

**INTERUPSI :**

Pimpinan, usul dulu.

**KETUA RAPAT :**

Mana ini?

**INTERUPSI :**

Saya sebelah kiri.

Kita memperpanjang rapat boleh saja ketika memang arah sudah ada kan begitu? Tetapi kalau tingkat problem yang kita hadapi sangat parsial kayak begini itu sampai besok juga tidak ada hasil, menurut saya kalau kayak begini kita *break* dulu belum ada jalan keluar kayak begini, itu yang saya usulkan jadi perpanjangan waktu rapat itu bukan formalitas tetapi memang mau menyelesaikan sesuatu, rentang waktu yang ada dan problem yang kita hadapi tidak mungkin untuk kita selesaikan karena itu diberikan kejar rapat.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih.

Karena ada beberapa pertanyaan mungkin juga bisa memperjelas apa yang diinginkan oleh Teman-teman semua, kita berikan dulu kesempatan kepada Prof Usman dan Prof Chandra untuk bisa menjawab ini. Untuk itu, diperlukan waktu kalau setuju berapa yang akan kita berikan waktu, mohon persetujuan, baik setengah jam ya.

**(RAPAT : SETUJU)**

Terima kasih.

Silakan Pak Usman atau Pak Chandra.

**KEPALA BADAN PPSDM :**

Terima kasih Bapak Pimpinan dan Ibu, Bapak sekalian.

Ini yang menjawabnya susah, saya disuruh duluan sama Pak Prof.

Ijin barangkali Bapak dan Ibu Pimpinan saya akan menjawab beberapa hal yang perlu penjelasan dahulu, mungkin yang poin utama tadi pertanyaan sebagian besar adalah soal detail rincian itu, saya akan jawab kemudian setelah ini. Saya ingin mendengarnya lebih enak dan menjelaskannya lebih semangat begitu ya. Yang pertama, adalah apa yang disampaikan tadi oleh Dr. Siti Masrifah mohon maaf betul ya Bu? Yang pertama, tentang pertanyaan Ibu yang nanti akan saya jawab kemudian, memang agak sulit saya menjawabnya, terus terang saya diskusi dari tadi sama Prof belum ketemu jawabnya apa saya mesti jawab tetapi nanti kita coba ya Bu, kita sepakati apa yang kita bisa diskusikan.

Kemudian, mengenai hasil penelitian, Ibu Okky saya pikir banyak sekali yang ditanyakan Beliau terkait dengan jumlah puskesmas yang memiliki nakes ini ya, jadi saya sekaligus menjawab soal akreditasi tidak nyambung ya, satu bahwa dalam era peningkatan mutu pelayanan maka akreditasi begitu sangat penting Ibu, supaya mutu itu menjadi terukur, itu pertama. Yang kedua, peran tenaga kesehatan kita sudah buat Permenkes di Tahun 2014 Ibu bahwa tenaga kesehatan puskesmas minimal 5 tenaga, itu standarnya kita. Jadi, apakah kemudian ini diperhitungkan dalam akreditasi? Iya, tetapi tidak utama, bukan tidak utama salah lagi, utama iya tetapi tenaga sembilan yang harus dipenuhi itu untuk mendorong *performance* puskesmas sebenarnya. Jadi, apa yang bisa dihasilkan oleh sembilan jenis tenaga itulah yang terukur nanti di akreditasi Bu selain tadi pertanyaan sarana prasarana yang harus dipenuhi, tadi pertanyaan Pak Ansory benar jadi apakah nanti puskesmas dengan lima tenaga kesehatan saja cukup atau tidak yang sembilan, yang lima ini kita *support* yang diluar tenaga UKP bu, yang Ibu selalu tanyakan mana yang promotif, preventif itu, jadi yang dokter, bidan, perawat itu kita anggap sudah terpenuhi di puskesmas. Yang kita mau tambahkan ini yang tenaga lima inti yang terkait dengan UKM Bu, ada promosi kesehatan, kesmas, analis yang belum banyak di puskesmas kemudian ada gizi masyarakat Ibu bukan gizi klinik yang bisa langsung mendeteksi gizi kekurangan kalori dan sebagainya itu, itu yang kita mau maksudkan 5 utama itu.

Nah, kaitannya sama akreditasi kita rencanakan 5600 memang dikaitkan dengan BUK yang menargetkan 5600 itu harus terakreditasi, jadi ini kait terkait memang Ibu, anggaran di kita juga seperti itu. Saya mohon maaf nanti ada barangkali tambahan dari Teman-teman saya di eselon 2 yang belum saya lengkapi, nanti ada bidangnya masing-masing yang saling sangat-sangat menguasai dibidangnya masing-masing. Kemudian, untuk yang intensif yang Ibu bilang jatuhnya sekitar 40 juta per orang, sebenarnya begini bu ini kan 1 tahun ya, kita kirim ke daerah-daerah dengan wahana praktek 8 bulan di Rumah Sakit, 4 bulan di Puskesmas, maksudnya memang intensif ini sebenarnya adalah bagian dari pendidikan Ibu belum kita akui dia definitif punya STN, bahwa dia harus matang, punya kemampuan betul-betul menjadi dokter karena sudah tahu lapangan, 1 tahun pengalaman itu, nah kita kirim 1 tahun, nah pemilihan wahana dan sebagainya kita tetapkan dia dengan sistem jadi dia online, tidak lagi satu per satu ini berlaku untuk tahun 2014 akhir Ibu, baru kita mulai dengan online sistem, tentu honoronya sama dari ujung ke ujung sama, memang ini bukan gaji sebenarnya tetapi ini bantuan hidup, karena

dia masih pendidikan sebenarnya, nanti kalau sudah selesai itu baru dia masuk menjadi pegawai, ini yang dibedakan, dia bagian dari pendidikan. Nah, tentu yang kita hitung semua bu, persiapan dia sebelum berangkat, pembekalannya kemudian kita kirim dia sesuai transportasinya, lalu ada pendamping, dokter pendamping ini dokter yang hari-harinya mengawasi dia seperti pada saat dia pendidikan, 1:5 Bu, jadi kalau dia 5 intensif ada 1 pembimbing, nah tahun ini kami akan perluas Bu, 1 pembimbing untuk 7 sampai 8, karena kebutuhannya semakin banyak, maka 1 pembimbing kita andaikan 1:7 nah ini semua kita biayai ada honorer dan sebagainya. Itulah tadi yang Ibu hitung sekitar 40 juta, itu semua transportasi, biaya lain kita hitung Pak, 1 tahun jadi kalau 1 tahun dulu Komisi IX DPR RI menyetujui biaya hidupnya itu 2,5 juta Bu, yang sebelumnya 1,2 juta, jadi baru naik Tahun 2014 1 tahun. Sekarang mereka sudah menuntut lagi bu kenapa cuma 2,5 juta, itu juga sudah mulai isu-isu muncul.

Lalu mengenai Tekawena ini, Ibu Tekawena ini sebenarnya kita satu tim ada Kementerian Luar Negeri karena biasanya mereka basicnya masuk dulu dari Kementerian, lalu ada Dirjen dari Kementerian Hukum dan Ham, imigrasi khususnya, lalu ada dari Depnakertrans ini terlibat, jadi kalau kita mau turun Kemkeslah yang membiayai untuk langsung intervensi ke lapangan, begitu Bu, kalau kita umumkan dulu kabur duluan karena kemarin di daerah-daerah Jakarta Selatan yang kita gerebek itu ternyata banyak tenaga-tenaga kesehatan luar negeri yang tidak berijin itu kita pulangkan, nanti mungkin dilengkapi oleh Pak Ahmad Bagyo kalau ingin jelas lagi karena memang ini ada kaitannya, ada semacam intelijen juga yang kita sisipkan juga, kerja sama dengan Provinsi setempat.

Lalu sarana pendidikan ini mungkin nanti sekaligus ya.

**F-PPP (Dra.Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si) :**

Pimpinan.

**KEPALA BADAN PPSDM :**

Silakan Bu.

**F-PPP (Dra.Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si) :**

Pak Usman, boleh menjawab yang tim based itu yang nusantara Indonesia itu statusnya apa yang ada 4 atau 5 kemarin Prof Akmal itu insentifnya segalanya itu.

Terima kasih.

**KEPALA BADAN PPSDM :**

Jadi begini Bu terima kasih saya sekaligus bisa lebih detail yang mengingatkan. Tim based ini adalah satu pemikiran penempatan tenaga kesehatan dengan cara lain tetapi *resources* yang ada yang kita manfaatkan Bu, jadi kalau sekarang kita punya penempatan tenaga kesehatan dengan PTT maka PTT itu kita manfaatkan dengan dana PTT nya itu dengan tim, jadi ada bidan, ada perawat, ada dokter, kan ada tiga

ya Bu sama ada penugasan khusus karena undang-undang memungkinkan. Lain lagi yang kita *create* dana-dana yang sudah ada ini untuk kita menempatkan ke Daerah-daerah perbatasan dulu Bu, tadi Pak Ansory bilang ini masalah performance negara ya terhadap luar, ini dulu yang kita lihat untuk kita tempatkan di 120 puskesmas, nanti rinciannya kita kasih 48 kabupaten itu Pak, mohon maaf karena saya pikir ini kan garis besarnya diskusi dulu tetapi kalau perlu rincian puskesmas yang mana saja kita bisa berikan. Jadi, itu 8 tenaga Bu bukan hanya 5, 5 tenaga itu yang 6500 puskesmas tadi yang harus terakreditasi, kalau yang ini hanya 120 puskesmas, daerah perbatasan, jadi misalnya daerah Kapuas, daerah NTT berbatasan dengan Timor-timor, Papua berbatasan dengan Papua Nugini itu kan perbatasan-perbatasan yang harus kita isi tenaga kesehatannya, jadi ini memang program baru tetapi sebenarnya di *create* dari anggaran yang ada Pak, jadi bukan sesuatu yang kita anggarkan fix baru begitu Bu, jadi yang kami kirim dokter ke perbatasan itu adalah menggunakan dana dokter PTT tadi, penggajiannya pakai daerah sangat terpencil bu, kalau dia dokter umum sekitar 7,3 juta sekian sama dengan penempatan PTT. Tetapi pertanyaan Ibu tadi statusnya bagaimana, itu yang sedang kita upayakan ke Menpan bisa dia selama 2 tahun menjadi pegawai negeri untuk yang ini persis karena dia mau berkorban untuk itu ya.

Yang kedua, saya mau jelaskan bahwa tim ini tidak sembarangan kita kirim, dia melalui pola rekrutmen khusus Bu, kita buat dia melalui website siapa yang mau mengerjakan ini, kami buka baru hari minggu lalu ya, itu yang mendaftar sudah 2000 lebih bu dan itu kualifikasinya harus kita ambil sekitar 160 orang untuk memenuhi 120 puskesmas, nah itu butuh biaya semua, merekrut orang kemudian menyisir lagi sesuai kebutuhan dan mereka kita latih 4 minggu sampai dia bisa kira-kira menghadapi tantangan di lapangan seperti apa sih untuk menjadi tenaga kesehatan, bagaimana kita isi dengan program-program pemerintah yang ada itu kita siapkan 1 bulan Pak, sampai kita kerja sama dengan angkatannya, angkatan sabtu minggu kemudian sabtu-minggu kita isi dulu dengan jiwa porsa itu, jadi ini memang agak lain Bu, karena ini daerah perbatasan, sebelum kita lakukan ini kita juga pinjam (tidak jelas)..

#### **KETUA RAPAT :**

Pak Usman, sebentar.

Dengan persetujuan Teman-teman semua mungkin bagaimana kalau umpamanya yang khusus tentang anggaran saja disampaikan, dijawab agar waktu kita bisa kita hemat banyak kemudian yang menyangkut tentang pengawasan nanti kita bisa perdalam pada kesempatan yang lain, jadi khusus tentang rincian anggaran yang tadi diminta oleh Teman-teman semua kemudian makna dari satuan tiga menurut Kementerian Kesehatan itu bagaimana, silakan.

#### **KEPALA BADAN PPSDM :**

Ya barangkali yang makna satuan tiga itu sebelum Pak Chandra ngomong, saya ngomong duluan.



Saya dikit dulu ya bu, yang 150 miliar tadi mengenai gedung mangkrak tadi termasuk Pak Hang Ali tadi ya, di Kalteng Palangkaraya itu memang ada gedung mangkrak, terus terang saya juga baru pelajari ini karena saya baru 3 bulanan di PPSDM mana yang mangkrak-mangkrak itu kita *report*, kita rinci, sekali lagi saya mau mengatakan sebenarnya anggaran ini sudah ada di DIPA semua yang kita diskusikan, jadi karena PPSDM dengan Litbang sebenarnya tidak punya dana tambahan Bu, dialokasi dana tambahan 3 koma sekian triliun, jadi yang Pak Ansory diskusikan ini sebenarnya anggarannya sudah di DIPA kita Pak Ansory, Tahun 2014 lalu Pak, jadi itu sudah fix kalau menurut saya rinciannya sebenarnya bisa dilihat secara terbuka dan transparan apa yang ada di website Kementerian Bu, cuman memang barangkali diskusinya seperti Bu Okky mempertanyakan rinciannya saya pikir perlu sosialisasi lebih detail supaya saling paham. Jadi, itu yang saya mau katakan Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, bahwa anggaran ini sudah ada di DIPA kita dan kita sudah terima DIPA bulan Desember. Yang didiskusikan BUK barangkali tadi malam memang yang mengenai 2,5 triliun itu yang penganggaran baru nanti APBNP begitu, saya tidak tahu nanti bagaimana ini bisa menjelaskannya begitu Ibu Pimpinan.

Barangkali itu dulu dari saya, apa saya mesti detailkan jawaban pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan tadi. Saya ijin ke Pimpinan dulu, kalau tidak ....

**KETUA RAPAT :**

Ini Teman-teman tadi yang bertanya, mungkin ada tanggapan silakan Pak Aditya barangkali.

**F-PKB (H. HANDAYANI, SKM) :**

Yang saya tanya tadi masalah spesialis tadi, sudah itu masalah pendidikan tadi yang akreditasi D3.

**KEPALA BADAN PPSDM :**

Jadi saya jawab ya Pak, memang penting pertanyaan ini karena banyak juga pertanyaan dari yang lain. Mengenai PPDS dan PPDS kami terbuka saja Pak, siapa pun dia yang lulus kami biayai sepanjang biaya itu masih tercukupi tetapi estimasi kita selalu cukup tetapi untuk menjamin bahwa dia ada dana ke fakultas itu belum pernah kita lakukan, itu persoalannya. Jadi, kalau ikut tes di perguruan mana pun sepanjang dia lulus kami bisa biayai, ini yang mengelola Ibu Menarwati. Tetapi kalau ada surat rekomendasi menyatakan kami biayai dia supaya dia bisa lulus itu saya tidak mau, karena dia belum dinyatakan lulus oleh fakultasnya dan kebanyakan perguruan tinggi juga tidak mau kalau perguruan tinggi itu baik, itu Pak ya karena dia bukan melihat dari anggaran tetapi dari sisi kelulusan.

**F-PG (ADITYA ANUGRAH MOHA, S.Ked) :**

Pimpinan, interupsi.

Jadi, saya sebenarnya lebih fokus tadi apa yang disampaikan oleh Pak Usman bahwa sesungguhnya postur anggaran ini sudah termaktub dalam DIPA dan sudah ada di website Kementerian. Kalau saya ini Pak Usman, ini kan kita periode yang baru Pak, ini masa periode DPR RI 2014-2019 kalau kami mungkin saya, Pak Ansory yang periode kemarin kita mungkin bisa, tetapi kalau Kawan-kawan ini sebagian besar masih baru. Pak Usman, ini terkait dengan tugas dan tanggung jawab mereka di daerah pemilihan masing-masing, nah apa yang disampaikan Kawan-kawan adalah lebih kepada bagaimana penguatan kepada Kementeriannya sendiri sesungguhnya kita ingin menguatkan dari sisi mana terutama tentu paradigmanya adalah daerah pemilihan masing-masing, daerah pemilihan Kawan-kawan ini, ini akan kita lihat misalnya tadi soal puskesmas nah masuk tidak di daerah pemilihan ini, ada tidak di daerah pemilihan mereka, yang ada daerah perbatasannya, yang terpencilnya, nah itu jadi sesungguhnya ini lebih kepada komitmen kita 5 tahun begitu Pak Usman. Bukan lagi kita bicara debatnya bahwa ini sudah ada di DIPA kemarin, bukan disitu sebenarnya, ini adalah lebih bagaimana penguatan bersama dan data yang hari ini kita mintakan dalam prospek ke depannya, karena kita tidak bicara untuk tahun ini, tidak akan bicara kesinambungan sampai 5 tahun ke depan. Itu kalau saya bisa ambil jalan tengahnya Pimpinan dan disamping tentu rincian ini tidak ada masalah, kalau menurut hemat saya tidak ada salahnya kalau untuk itu kita bisa diskusikan dalam kaitan untuk penguatan kinerjanya, itu Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, jadi *clear* ya?

Nanti mungkin Pak Usman bisa menyampaikan kepada Komisi IX DPR RI tentang rincian tersebut, selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Prof Chandra?

**KEPALA BALITBANGKES:**

Terima kasih Pimpinan.

**Bapak, Ibu Anggota yang terhormat.**

Kalau yang tadi tambahan rincian dan sebagainya kita akan siapkan yang ada di dalam DIPA badan Litbang nanti akan disampaikan, itu prinsip besarnya seperti itu. Kalau yang lain tentang detail ijin Pimpinan mau dijawab atau yang teknis peran Ormas, tikus dan sebagainya.

**F-PG (ADITYA ANUGRAH MOHA, S.Ked) :**

Pimpinan, kalau untuk terkait pengawasan tanpa mengurangi rasa hormat saya mengusulkan untuk bisa dengan tertulis Pak Prof, nanti kalau

untuk pengawasan kita detail, karena ada berapa, kalau saya sendiri sih banyak yang mau didalami, terutama tadi untuk tim yang dibuat untuk nusantara sehat dan sebagainya. Soal akreditasi tadi malam saya debatable panjang dengan Prof. Akmal soal akreditasi, karena saya temui data saya di daerah Sulawesi Utara saja sudah 4 rumah sakit yang kadaluarsa akreditasinya, belum lagi yang puskesmasnya, itu yang dari data saya, ada 1000 yang dari data yang dikasih dan 1126 yang belum terakreditasi rumah sakitnya, belum puskesmasnya, kalau untuk pengawasan saya punya data untuk itu Pak Usman. Kita akan *strike* soal itu, jadi tetapi karena ini materinya soal anggaran kita fokuskanlah dulu disitu, jadi biar kita enak, nanti kita atur RKPnya. Begitu Pimpinan usulan saya.

**KETUA RAPAT :**

Prof masih ada yang dijawab soal anggaran? Cukup?

Seperti tadi pagi untuk Dirjen P2PL dan PG dan KIA itu juga kita minta perincian lengkap dan kebetulan yang bersangkutan membawa dan disampaikan langsung sehingga tidak ada masalah untuk kita semua, nah kalau umpamanya kalau dari Bapak-bapak yang juga hadir dengan seluruh jajarannya juga tersedia rinciannya baik disampaikan karena itu sangat diperlukan untuk kita menyetujui anggaran ini atau membicarakan anggaran ini dengan menteri nanti malam, masih agenda ya? Nah, kalau ini bisa disampaikan ini akan bisa membantu begitu ya.

Kalau tidak ada lagi kita bisa masuk ke kesimpulan, bisa ditayangkan? Ada Pak Usman?

**KEPALA BADAN PPSDM :**

Ijin Pimpinan.

Jadi, sebenarnya prinsipnya kita tidak ada masalah, cuman tadinya saya pikir justru ini pendalaman dari setiap *item* yang kita tampilkan secara makro itu, begitu Pak. Jadi saya rasa karena dari kita karena DIPAnya sudah terbuka rasanya tidak ada masalah begitu kalau DIPAnya beliau sendiri mengamanatkan di Tahun 2014 begitu, cuman tadinya kami berpikir di pertemuan ini ada pendalaman soal apa yang kita kerjakan di tahun 2015 itu. Barangkali itu Ibu Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Ya memang betul pendalaman.

Oleh karena itu, pertanyaan dari Anggota Komisi IX DPR RI itu adalah umpamanya ada kegiatan dengan kegiatan tertentu dimana saja dilakukan dan berapa besar anggarannya, ini nanti menyangkut kepada fungsi pengawasan yang akan dilakukan oleh Anggota DPR RI khususnya di Komisi IX DPR RI, jadi memang pendalaman yang kita lakukan, tetapi umpamanya tidak ada kita berharap bahwa itu bisa disampaikan sehingga bisa menjadi bahan yang akan dipelajari selanjutnya dari Teman-teman Anggota Komisi IX DPR RI. Kalau tidak ada lagi kita akan masuk pada kesimpulan, jadi ini draft kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX

DPR RI dengan Kepala Badan PPSDM Kesehatan dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Selasa 10 Februari 2015 :

1. Komisi IX DPR RI telah mendapatkan penjelasan dari Kepala Badan PPSDM Kesehatan dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa :
  - a. Alokasi anggaran untuk Badan PPSDM Kesehatan pada APBN Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.3.568.570.000,- (*Tiga Triliun Lima Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*). Badan PPSDM mengajukan usulan anggaran sebesar Rp.1.055.128.220.000,- (*Satu Triliun Lima Puluh Lima Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*). Usulan tambahan ini belum mendapat alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam APBN Tahun Anggaran 2015.
  - b. Alokasi anggaran untuk Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan pada APBN Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.774.483.100.000,- (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah*).
2. Komisi IX DPR RI meminta Badan PPSDM Kesehatan dan Balitbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk menyampaikan rincian program kegiatan Tahun 2015 termasuk indikator capaian dan alokasi anggaran masing-masing yang akan menjadi dasar keputusan Komisi IX DPR RI.
3. Komisi IX DPR RI meminta Badan PPSDM Kesehatan dan Balitbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan penajaman program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TU Poksi masing-masing dengan memperhatikan aspirasi daerah sebagai bentuk pelaksanaan dan representasi Anggota DPR RI.
4. Komisi IX DPR RI akan mengagendakan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk mengambil keputusan terkait pembahasan alokasi anggaran untuk Badan PPSDM Kesehatan dan Balitbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam APBN Tahun Anggaran 2015.

Bagaimana dari Teman-teman Komisi IX DPR RI ada koreksi? Kalau tidak ada dari pihak Pemerintah, kalau tidak ada? Ya silakan.

**KEPALA BADAN PPSDM :**

Ijin Ibu.

Kami sepakat ini di PPSDM untuk usulan yang Rp.1.055.128.220.000,- (*Satu Triliun Lima Puluh Lima Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) yang di kalimat nomer 1 itu dihilangkan saja dulu karena kami belum secara resmi juga mengajukan ini ke Kementerian Kesehatan.

**KETUA RAPAT :**

Oh yang nomer 1a ya?

**KEPALA BADAN PPSDM :**

Kami mengusulkan karena ada acara ini kami mengusulkan kira-kira kebutuhannya seperti itu tetapi kami belum secara resmi menulis surat ini ke Kementerian Keuangan maupun ke Kementerian Kesehatan, prosedurnya belum resmi Bu.

**KETUA RAPAT :**

Oke, kalau begitu kita *delete* ya.

Baik, sampai disini setuju? Kalau sudah disetujui sudah kita ketok ya.

**F-PDIP (NURSUHUD) :**

Mohon dilihat yang paling bawah Bu kalimatnya.

Pimpinan, ini yang memperhatikan aspirasi daerah itu apa maksudnya? DPR RI itu kan daerah pemilihan itu cara memilih bukan mewakili Dapil, itu kalau persepsinya kayak begitu ya salah total cara berpikirnya, ini saya ingatkan sifatnya jadi itu salah. Jadi, daerah pemilihan itu cara memilih di dalam Undang-Undang Pemilu, bukan kita representasi Dapil, salah total itu, jadi setelah seseorang terpilih itu dia mewakili seluruh rakyat Indonesia dimana pun dia berada, jadi itu tidak etis pencantuman kayak begini. Itu mohon dihapus, ini peringatan keras keliru itu.

**KETUA RAPAT :**

Ini yang nomer 3?

**F-PDIP (NURSUHUD) :**

Ya itu bermotif itu salah, itu mesti dihapus.

**KETUA RAPAT :**

Komisi IX DPR RI meminta Badan PPSDM Kesehatan dan Balitbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan penajaman program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TU Poksi masing-masing dengan memperhatikan aspirasi daerah sebagai bentuk pelaksanaan dan representasi Anggota DPR RI.

**F-PDIP (NURSUHUD) :**

Itu motif kalimatnya semua orang paham itu tidak sehat dan itu kekeliruan terhadap fungsi parlemen.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Ada yang lain?

**F-(ANGGOTA) :**

**Saudara Pimpinan,**

Memang tadi kita sudah rapat sebelumnya kalimat yang sama, jadi memang klausulannya itu memang seperti itu cara jadi memang coba tadi tolong diputuskan jadi tolong dibicarakan di Pimpinan supaya rumusannya itu sesuai dengan aturan bukan sekedar kepentingan jangka pendek tetapi mencakup hal-hal yang sangat penting di dalam undang-undang.

**F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc) :**

Sebentar.

Mungkin apa mungkin bahasanya agak diperlembut mungkin ya, mungkin saya agak lain dengan Bapak Nursuhud, karena yang dikasih tanda ini, ini persis dengan di Undang-Undang Dasar ada, Undang-Undang MD3 ada jelas pasalnya begitu, cuman mungkin apakah bahasanya agak sedikit diperhalus tetapi ini sesuai dengan undang-undang di MD3 ada bahwa bahkan sewaktu kita disumpah itu kita ada dibawahnya itu untuk memperjuangkan daerah pemilihan begitu ya tetapi mungkin bahasa ini konotasinya agak sedikit kurang enak tetapi mungkin perlu di, tetapi ini sesuai sebenarnya dengan undang-undang MD3 yang sudah kita bahas begitu, diperlembut atau di apa begitu.

**KETUA RAPAT :**

Baik, dari meja Pimpinan ada Pak Pius.

**F-PDIP (NURSUHUD) :**

Pimpinan, saya mau tambah sedikit.

Jadi rapat itu tidak ada segmen rapat, semua rapat itu satu kesatuan dan itu ada masuk di dalam dokumen negara, jadi munculnya kalimat itu di dalam putusan rapat itu bukan sesuatu yang tiba-tiba, ada sebab (rekaman terputus) maksud ini, jadi kalau teman lain tetap melihat jadi kalau parlemen itu bukan bersatu padu memilih yang keliru, jadi ada etik, ada tafsir terhadap norma dan ketika penafsir norma itu ada kaitan bukan subyektivitas dan kalau mencari runutan itu bukan karena sumpah itu, coba anda pelajari lagi itu tidak ada kaitan sumpah sama mandat itu tidak ada, sumpah itu secara formalitas karena itu kaitan kelanjutan dari proses di dalam pelaksanaan Undang-Undang Pemilu dan kalimat ini ada rentetannya bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Jadi, kalau satu kali terjadi sesuatu ini orang tadi lihat *oh ini adalah bagian kaitan dari Rapat-rapat*, karena transkrip rapatnya itu kan terekam gampang di akses kan begitu dan meskipun Saudara Ansory menganggap rapat itu tertutup, oh tidak ada yang tertutup di dalam prinsip Rapat-rapat DPR RI, tidak ada Badan-badan

Negara lain yang punya kewenangan untuk membuka Rapat-rapat kita, jadi sekali lagi kalau toh teman lain tetap mencantumkan ini saya adalah yang menolak pengkalimatan kayak begini itu, ada pengertian yang keliru di dalam prinsip memahami apa posisi parlemen sebenarnya, keliru secara mendasar keliru.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, sebenarnya kalau ditanya apakah ini ada asbabul nuzulnya atau tidak, ada Rapat tanggal 4 Februari, saya tidak tahu Bapak hadir atau tidak waktu itu Rapat dengan Menteri Kesehatan.

**F-PDIP (NURSUHUD) :**

Bu, jadi begini jadi rentetan itu bukan satu kali rapat, jadi dalam pengkaitan Rapat-rapat sebelumnya termasuk tahun lalu pikiran macam begini itu muncul juga dan kita tahu maksudnya apa pihak diluar kita juga atau apa maksudnya kan begitu, terima kasih, kalau itu belum paham ya (tidak jelas).

**KETUA RAPAT :**

Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang kita ambil ketika Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan ada butir 4 itu menjelaskan bahwa *Komisi IX DPR RI pada alinea terakhir itu menyebutkan juga tentang sebagai bentuk pelaksanaan aspirasi Anggota Komisi IX DPR RI*, nah waktu itu kita juga diskusi panjang bahwa ini adalah hasil keputusan Rapat Kerja waktu itu yang menjadi dasar, nah ini mungkin Pak Pius juga akan ambil posisi, silakan.

**F-GERINIDRA (PIUS LUSTRILANANG, SIP.,M.Si) :**

Saya dalam posisi tidak akan *histories*, apa yang disimpulkan dalam banyak pertemuan sebelumnya yang dihadiri oleh banyak Anggota mau dihilangkan hanya karena 1 orang yang seolah-olah punya pemahaman paling benar saya tidak sepakat, masing-masing punya alasan kenapa klausul ini atau kalimat ini kita cantumkan di dalam kesimpulan kita, saya sebagai Anggota DPR RI dipilih oleh konsituen dan kewajiban saya adalah memperjuangkan aspirasi Dapil saya. Sebagai pemerintah, pemerintah memperhatikan seluruh aspirasi dari Republik Indonesia tetapi karena anggarannya terbatas, tetap saja ada proses yang namanya *diskresi* ya Pemerintah tidak bisa membagikan dana yang tersedia memenuhi seluruh keinginan Republik ini, Pemerintah punya *diskresi*, nah dalam *diskresi* pemerintah ini Anggota DPR RI juga menitipkan tolong juga diperhatikan itulah makna dari kesimpulan ini ya dan itu ada kewajiban dalam undang-undang ada, jadi saya tidak ingin setiap diskusi kita mundur ya, tidak ada seorang pun yang boleh membatalkan kesimpulan yang sudah kita susun dalam berkali-kali pertemuan dengan penafsiran dia mengatakan seolah-olah benar sendiri. Saya pikir ini pernyataan dari saya.

**F-PG (ADITYA ANUGRAH MOHA, S.Ked) :**

Pimpinan, khusus untuk poin ini saya pikir kita bisa mencari redaksi betul saya sepakat dengan Ketua bahwa ini adalah bagian dari keputusan komisi, nah jadi untuk soal ini kita bisa Rapat Internal dalam kaitan untuk pembahasan tetapi prinsip kalau memang Pak Nursuhud mau ada *miss (tidak jelas)* tidak masalah tetapi prinsip ini harus dijalankan karena tidak sesuai dengan apa yang kita bicarakan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih.

**F-PDIP (NURSUHUD) :**

Jadi saya *meretorta* ya dan teman Fraksi PDI Perjuangan yang lain juga *meretorta* terhadap ini.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Ada yang dari PDI Perjuangan yang lain? Bu Ning juga?

**F-PDIP (dr.RIBKA TJIPTANING) :**

Saya yang dari Dirjen tadi, yang dua tadi P2PL dan itu saya sudah berkomentar juga.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, kalau begitu bisa kita putuskan?

**(RAPAT : SETUJU)**

Terima kasih.

Baik, untuk kata akhir dari Pak Chandra atau Pak Usman silakan untuk mewakili.

**KEPALA BALITBANGKES :**

Mohon maaf Pimpinan.

Tadi saya mau menanyakan yang nomer 4 kalau memungkinkan. *Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk mengambil keputusan terkait pembahasan alokasi anggaran untuk Badan PPSDM Kesehatan dan Balitbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam APBNP Tahun Anggaran 2015*, kalau kami dari Balitbangkes belum mengajukan untuk APBNP, kenapa kami belum mengajukan? Karena penelitian itu



butuh waktu pengumpulan data sehingga kami agak khawatir waktunya tidak terkejar. Jadi, ini yang ingin saya pertanyakan sebenarnya.

**F-GERINIDRA (PIUS LUSTRILANANG, SIP.,M.Si) :**

Interupsi Pimpinan.

Aspirasi ini muncul karena kita berpatokan pada Rapat Kerja Menteri Kesehatan dan Anggota Periode yang lalu.

**F-PG (Dr. CHARLES J. MESANG) :**

Minta maaf Pimpinan, minta maaf sekali lagi Pak Pimpinan.

Setelah ini kita Rapat Internal, tidak elok kita di hadapan mitra kerja.

Terima kasih.

**F-GERINIDRA (PIUS LUSTRILANANG, SIP.,M.Si) :**

Ya sudah tidak akan saya perpanjang.

**KETUA RAPAT :**

Yang hubungannya mana?

**F-GERINIDRA (PIUS LUSTRILANANG, SIP.,M.Si) :**

Pimpinan poin 4 itu, setahu kami masalah APBNP ini dari kedua badan itu hanya PPSDM saja yang dapat sedangkan Balitbangkes tidak, itu dari dana optimalisasi, jadi tidak bisa disamakan, jadi dibuang saja Balitbangkes karena Balitbangkes murni di dalam APBNP tidak juga ada penambahan dan kekurangan, jadi PPSDM saja.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Cocok sudah ya.

**(RAPAT : SETUJU)**

Kata akhir Pak Badan PPSDM silakan.

**KEPALA BADAN PPSDM :**

**Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI yang kami hormati.**

Atas nama Badan PPSDM, Badan Litbangkes mengucapkan terima kasih atas rapat kita pada sore hari ini dengan 4 (empat) kesimpulan, tentu kita berharap agar Rapat ini dan kesimpulannya mempunyai makna besar untuk peningkatan kesehatan masyarakat Indonesia.

Terima kasih Bapak, Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

Baik, *alhamdulillah* kita sudah menyelesaikan rapat kita, masih tersisa satu rapat lagi sebelum kita Raker dan kita kemudian dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbil alamin Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Tharieq* kita tutup rapat ini.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**(RAPAT DISKORS PUKUL 16.40 WIB)**

**Jakarta, 10 Februari 2015  
a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,**

**ttd.**

**MUHAMMAD YUS IQBAL, SE**